



# **KAJIAN INDIKATOR PENINGKATAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN**



## **KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021**



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG**



# **KAJIAN INDIKATOR PENINGKATAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN KABUPATEN BANDUNG**

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG

# KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Kajian Indikator Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan di Kabupaten Bandung dapat diselesaikan. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.

Kajian ini menyajikan hasil analisis indikator kinerja pada perangkat daerah lintas sektor yang mendukung penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Bandung. Konsumsi pangan penduduk yang berkualitas dinilai melalui skor PPH yang merupakan salah satu indikator kinerja kepala daerah di Kabupaten Bandung. Analisis indikator kinerja didasarkan pada sistem pangan berkelanjutan (FAO 2018) yang terdiri atas sistem inti, elemen sosial, dan elemen alam. Sistem pangan berkelanjutan merupakan konsep holistik yang menggambarkan semua elemen, kegiatan, institusi yang diperlukan untuk memenuhi kualitas konsumsi pangan penduduk.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung serta semua pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini dapat berlanjut dan berkembang pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung.

Bogor, Januari 2022

Tim Penyusun

# UCAPAN TERIMA KASIH

---

Penyusunan Kajian Indikator Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Kabupaten Bandung ini dapat terlaksana berkat komitmen dan kerja sama yang baik antara semua pihak yang terlibat. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Penyusun dan seluruh pihak lintas OPD atas kerja keras dan kontribusinya sehingga Kajian indikator Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Kabupaten Bandung ini dapat diselesaikan. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

## **PENGARAH**

Hj. Haslili Lindayani Lubis, SE.,MM (Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung)  
Dr. Dadan Wardhana, STP, MPP,MT, (Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Kabupaten Bandung)

## **KETUA**

Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, MS

## **TIM PENYUSUN**

Wilaga A. Kharis, SE, MSi  
Marina Noor Prathivi, STP, MM  
Adrian, SPd, MSi  
Syahriphona Fitriani, SGz  
Sintawaty, SP, MSi (Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung)  
Iwanudin, SIp (Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung)  
Syaeful Argandi, SP (Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung)

## **Institusi Terkait Penyusunan Kajian Indikator Peningkatan Kualitas Konsumsi**

Bappeda Kabupaten Bandung; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung; Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung; Dinas Sosial Kabupaten Bandung; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung; Dinas Pertanian Kabupaten Bandung; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung; Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung; Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung; Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Keluaran	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran	3
BAB II LANDASAN HUKUM	9
BAB III METODOLOGI	17
3.1 Sumber dan Jenis Data	17
3.2 Pengolahan dan Analisis Data	19
BAB IV SITUASI KONSUMSI PANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014-2020	21
4.1 Perkembangan Konsumsi Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2014-2020	21
4.2 Evaluasi Pencapaian Skor PPH	28
BAB V ANALISIS KESESUAIAN INDIKATOR DALAM RPJMD DAN RENSTRA DENGAN SISTEM PANGAN	29
5.1. Analisis Kesesuaian Indikator RPJMD dengan Sistem Pangan	29
5.2. Analisis Kesesuaian Indikator dalam Renstra 17 OPD dengan Sistem Pangan	33
BAB VI PENUTUP	50

6.1 Simpulan	50
6.2 Saran	50
BAB VII DAFTAR PUSTAKA	51
BAB VIII LAMPIRAN	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pembagian urusan pemerintahan bidang pangan .....	10
Tabel 2	Aspek beserta indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan <i>outcome</i> Pemerintah Daerah.....	13
Tabel 3	Jenis dan Sumber Data .....	17
Tabel 4	Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Kabupaten Bandung Tahun 2014- 2020 .....	21
Tabel 5	Perkembangan skor PPH Kabupaten Bandung Tahun 2014-2020.....	22
Tabel 6.	Evaluasi Pencapaian Skor PPH Tahun 2021 .....	28
Tabel 7	Persentase indikator program pada masing-masing elemen/sistem sesuai sistem pangan .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sistem pangan (FAO 2018) .....	5
Gambar 2 Kerangka indikator program OPD yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan .....	20
Gambar 3. Perkembangan Konsumsi Padi-Padian Tahun 2014-2020 .....	23
Gambar 4 Perkembangan Konsumsi Umbi-Umbian Tahun 2014-2020 .....	23
Gambar 5 Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2014-2020.....	24
Gambar 6 Perkembangan Konsumsi Minyak dan Lemak Tahun 2014-2020 .....	25
Gambar 7 Perkembangan Konsumsi Buah/Biji Berminyak Tahun 2014-2020 .....	26
Gambar 8 Perkembangan Konsumsi Kacang-Kacangan Tahun 2014-2020 .....	26
Gambar 9 Perkembangan Konsumsi Gula Tahun 2014-2020.....	27
Gambar 10 Perkembangan Konsumsi Sayur Buah Tahun 2014-2020.....	28
Gambar 11 Indikator program RPJMD yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan .....	32
Gambar 12 Indikator program Dispakan sesuai sistem pangan .....	34
Gambar 13 Indikator program Distan sesuai sistem pangan .....	35
Gambar 14 Indikator program Disperindag sesuai sistem pangan .....	36
Gambar 15 Indikator program Dinkes sesuai sistem pangan .....	37
Gambar 16 Indikator program Dinsos sesuai sistem pangan .....	38
Gambar 17 Indikator program Dispora sesuai sistem pangan.....	39
Gambar 18 Indikator program Diskominfo sesuai sistem pangan .....	40
Gambar 19 Indikator program BPS sesuai sistem pangan .....	40
Gambar 20 Indikator program DLH sesuai sistem pangan .....	41
Gambar 21 Indikator program DPMD sesuai sistem pangan.....	42
Gambar 22 Indikator program DP2KBP3A sesuai sistem pangan.....	43
Gambar 23 Indikator program Disdik sesuai sistem pangan.....	45
Gambar 24 Indikator program Disparbud sesuai sistem pangan.....	46
Gambar 25 Indikator program DinkopUKM sesuai sistem pangan .....	47
Gambar 26 Indikator program Disperkimtan sesuai sistem pangan.....	47
Gambar 27 Indikator program DPUTR sesuai sistem pangan .....	48
Gambar 28 Indikator program Bappeda sesuai sistem pangan.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kesesuaian indikator RPJMD dengan Sistem Pangan .....	54
Lampiran 2	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan .....	68
Lampiran 3	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pertanian .....	71
Lampiran 4	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	75
Lampiran 5	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Kesehatan .....	78
Lampiran 6	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Sosial .....	80
Lampiran 7	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga .....	81
Lampiran 8	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	82
Lampiran 9	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Badan Pusat Statistik .....	83
Lampiran 10	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Lingkungan Hidup .....	84
Lampiran 11	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	86
Lampiran 12	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	87
Lampiran 13	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pendidikan .....	90
Lampiran 14	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pariwisata dan Budaya .....	92
Lampiran 15	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	94

Lampiran 16	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	96
Lampiran 17	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	97
Lampiran 18	Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah .....	99

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Tujuan pembangunan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberhasilan pembangunan nasional dapat tercapai dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang memiliki fisik yang sehat, mental yang kuat, serta penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi menyebutkan bahwa dengan peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan aset yang berharga bagi bangsa dan negara Indonesia. Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan status gizi yang optimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berkomitmen melakukan perbaikan gizi secara berkelanjutan.

Masalah gizi dapat disebabkan oleh multidimensi seperti yang termuat dalam kerangka UNICEF tahun 1998, mulai dari penyebab langsung yaitu konsumsi pangan yang tidak memadai dan infeksi. Adapun penyebab tidak langsung mencakup ketersediaan pangan, pola asuh, ketersediaan air bersih, kesehatan lingkungan serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Penyebab mendasar dari faktor-faktor tersebut adalah ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan, kemiskinan, ekonomi, ideologi, politik, hingga sistem pemerintahan. Pengaturan tentang hal tersebut tercermin dari dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perbaikan masalah gizi melalui perbaikan kualitas konsumsi pangan harus menjadi komitmen pemerintah daerah.

Urusan pangan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung yang termuat dalam Misi Kelima Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026. Misi kelima Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026 yaitu **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah** dengan tujuan **Meningkatkan ketahanan pangan daerah** dan sasaran **Menurunkan masalah pangan daerah** serta indikator **skor PPH konsumsi**. Skor PPH konsumsi pangan yang merupakan

indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2018 hingga 2021 tidak mencapai target dan trennya justru mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan peninjauan pada dokumen RPJMD dan Renstra lintas OPD untuk melihat konvergensi program dan kegiatan yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan.

Sistem pangan mencakup seluruh jajaran pelaku dan aktivitas nilai tambah yang saling terkait dan terlibat dalam proses produksi, agregasi, pengolahan, distribusi, konsumsi dan pembuangan produk yang berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, serta merupakan bagian dari ekonomi, sosial, dan alam yang lebih luas. Sistem pangan merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyerukan transformasi dalam pertanian dan sistem pangan untuk mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan gizi. Melalui pendekatan sistem pangan, mengubah satu bagian pada sistem pangan dapat merubah seluruh sistem menuju kemudahan bagi penduduk dalam mengakses dan mempertahankan konsumsi pangan yang berkualitas. Melalui sistem pangan juga dapat diketahui keterkaitan secara eksplisit di seluruh lini yang berkaitan dengan produksi, agregasi, distribusi dan konsumsi pangan. Hal tersebut diperlukan untuk pengembangan kebijakan dan implementasi terkait perbaikan konsumsi pangan. Keterkaitan seluruh lini sistem pangan sangat kompleks sehingga memerlukan peran multisektor. Keterlibatan perangkat daerah multisektor diharapkan bisa menjadi solusi dalam upaya percepatan perbaikan konsumsi pangan khususnya di Kabupaten Bandung.

Rencana kerja perangkat daerah memuat indikator kinerja. Indikator merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 13 ayat 2). Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap indikator yang relevan dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan pada dokumen RPJMD dan 17 Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah terkait.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan indikator peningkatan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Bandung ini bertujuan untuk melihat konvergensi program/kegiatan dalam dokumen RPJMD dan Renstra dari 17 perangkat daerah (OPD) yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan. Kualitas konsumsi pangan diukur dari skor PPH konsumsi yang juga merupakan indikator kinerja utama dalam RPJMD Kabupaten Bandung. Tujuan khusus kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kesesuaian indikator dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan.
2. Menganalisis serta mengevaluasi indikator dalam Renstra 17 OPD Kabupaten Bandung yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan.

## **1.3 Keluaran**

Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan keluaran sebagai berikut :

1. Indikator kinerja RPJMD (indikator makro pembangunan, indikator kinerja utama, indikator kinerja program pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum) yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan.
2. Indikator program, indikator kegiatan, indikator sub kegiatan dalam Renstra 17 OPD yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan.

## **1.4 Manfaat**

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kesesuaian RPJMD dan Renstra 17 OPD yang mendukung percepatan peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bandung.
2. Bahan masukan bagi para perumus kebijakan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk.

## **1.5 Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Ruang Lingkup**

Dokumen ini disusun menggunakan data sekunder lingkup Kabupaten Bandung yang dipublikasi tahun 2021. Data yang digunakan adalah Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2016 dan Rencana Strategis (Renstra) 17 OPD. Ruang lingkup indikator yang dianalisis dalam RPJMD adalah indikator makro pembangunan, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah

(indikator kinerja program) aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum. Adapun indikator yang dianalisis dalam Renstra 17 OPD adalah indikator program, indikator kegiatan, dan indikator sub kegiatan.

### **1.5.2 Kerangka pemikiran**

Penyebab masalah gizi berdasarkan UNICEF 1998 terbagi atas tiga, yaitu penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar. Penyebab langsung dari masalah gizi meliputi konsumsi pangan yang tidak memadai dan penyakit infeksi. Adapun penyebab tidak langsung mencakup ketersediaan pangan, pola asuh, ketersediaan air bersih, kesehatan lingkungan serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Penyebab mendasar dari faktor-faktor tersebut adalah ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan, kemiskinan, ekonomi, ideologi, politik, hingga sistem pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan perlunya komitmen pemerintah dalam pengentasan masalah gizi melalui perbaikan kualitas konsumsi pangan dengan cara konvergensi lintas OPD untuk mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan.

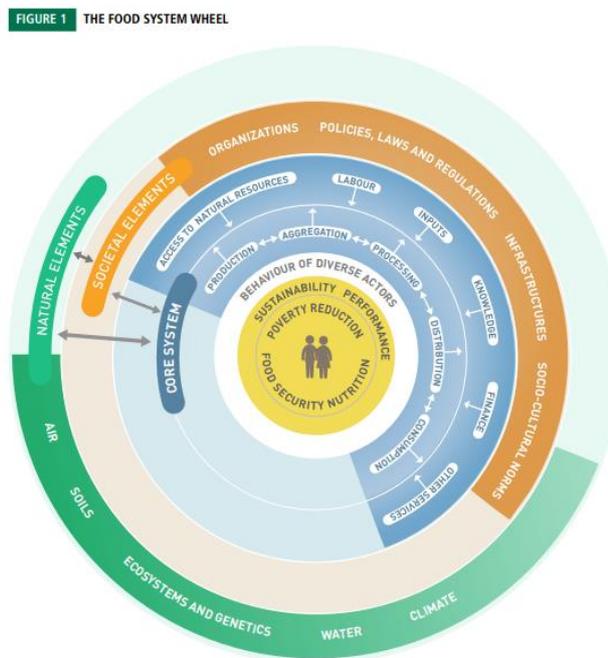
Penyusunan indikator peningkatan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Bandung berdasarkan RPJMD dan Renstra 17 OPD menggunakan pendekatan sistem pangan (*food system wheel*) yang dipublikasi oleh *Food Agricultural Organization* (FAO) tahun 2018. Sistem pangan merupakan seluruh jajaran pelaku dan aktivitas nilai tambah yang saling terlibat dalam proses produksi, agregasi, pengolahan, distribusi, konsumsi, hingga pembuangan produk pangan yang berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, serta cakupan yang lebih luas seperti lingkungan ekonomi, sosial, dan alam. Pendekatan sistem pangan menjurus ke segala lini yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui semua aspek, mulai dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan melalui sistem pangan telah menunjukkan banyak hal positif, terutama tiga dekade terakhir di beberapa negara berkembang.

Sistem pangan bersifat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi. Kompleksitas masalah pangan memerlukan pendekatan dari sistem pangan, sehingga berbagai tantangan di segala lini dapat ditemukan solusinya. Kompleksitas masalah pangan juga memerlukan tindakan terpadu yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Tindakan terpadu tersebut tidak hanya berfokus pada bidang pertanian, melainkan bidang perdagangan, kesehatan, lingkungan, norma/gender, pendidikan, transportasi, infrastruktur dan sebagainya. Pendekatan dengan sistem pangan berarti

mempertimbangkan seluruh elemen, hubungan antar elemen, serta efek terkait yang dapat ditimbulkan.

Pendekatan melalui sistem pangan diharapkan dapat mengatasi keterbatasan dari pendekatan tradisional dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang cenderung hanya terbatas pada satu sektoral saja atau menjadi lingkup dari satu kementerian/perangkat daerah saja. Pendekatan melalui sistem pangan diharapkan dapat menjadi pendorong aktor pembangunan dan pembuat kebijakan untuk melihat gambaran yang lebih luas sehingga dapat berkoordinasi dan melakukan kolaborasi di berbagai lingkup untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep sistem pangan terdiri atas sistem inti, elemen sosial, dan elemen alam. Sistem inti meliputi kegiatan atau rantai aliran pangan, mulai dari produksi, agregasi, pengolahan, distribusi dan konsumsi. Sistem inti dapat dipengaruhi oleh unsur sosial mencakup kebijakan dan peraturan hukum, norma sosial budaya, infrastruktur dan organisasi, termasuk program dan kegiatan lintas bidang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan maupun OPD terkait di Kabupaten Bandung, berdasarkan RPJMD dan Renstra tahun 2021-2026. Sistem pangan juga dipengaruhi oleh elemen alam, seperti air, tanah, udara, iklim, ekosistem dan genetik. Gambaran umum sistem pangan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Sistem pangan (FAO 2018)

Rantai pasok pangan atau sistem inti terdiri atas aktivitas maupun pelaku yang berhubungan langsung dengan rantai pangan, mulai dari tahap produksi, agregasi, proses,

distribusi, konsumsi bahkan sampai ke tahap pembuangan limbah makanan. Setiap langkah pada pada rantai pasok pangan melibatkan banyak pelaku, mulai dari skala kecil, skala besar, publik, swasta bahkan pemerintah atau dinas terkait dalam pemerintahan. **Sistem produksi** mencakup bidang pertanian secara umum, mulai dari pertanian, hortikultura, perkebunan dan perikanan. Pertanian dan sistem produksi pangan mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan sebagai kualitas dan keberagaman pangan daerah. Aktor yang terlibat langsung pada sistem produksi diantaranya adalah petani, nelayan, agribisnis, entitas keuangan, dan sebagainya. Adapun aktor pemerintahan yang memiliki peran dalam sistem produksi meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Ketahanan pangan. Aktor tersebut berperan dalam fasilitasi serta pembuat kebijakan agar sistem produksi pangan dalam suatu wilayah berjalan lancar, pangan daerah tercukupi, dan menjamin ketersediaan pangan daerah secara umum. Pangan yang telah diproduksi tidak hanya dikonsumsi oleh produsen, melainkan dikumpulkan, disimpan yang kemudian dapat didistribusikan hingga tiba pada konsumen yang lain.

**Sistem agregasi (pengumpulan) dan proses** merupakan tahap selanjutnya dari rantai pasok pangan setelah produksi. Pada tahap agregasi dan proses, kehilangan kualitas makanan dan limbah berpengaruh terhadap kualitas makanan. Penyimpanan yang baik akan mengurangi risiko bahan makanan rusak, sedangkan tahap proses yang baik akan mengurangi limbah yang terbuang dari makanan yang dihasilkan sehingga kuantitas makanan dapat lebih optimal. Aktor yang berperan langsung pada tahap ini meliputi petani, nelayan, agribisnis, pengepul dan sebagainya. Adapun aktor pemerintah yang memiliki peran dalam mendukung sistem agregasi dan proses diantaranya adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan. Rantai pasok makanan selanjutnya adalah distribusi pangan.

**Sistem Distribusi** merupakan proses penyaluran bahan makanan dari produsen maupun pengepul agar dapat sampai ke tangan konsumen. Proses distribusi membutuhkan perhatian besar, terutama pada keamanan pangan dan limbah yang tercecer. Penyimpanan yang kurang baik pada saat proses distribusi menyebabkan bahan pangan akan mudah rusak dan menciptakan banyak peluang kontaminasi yang merugikan konsumen. Kurangnya penanganan atau manajemen penyimpanan pada saat distribusi pangan juga menyebabkan tingginya limbah pangan (*food loss*) sehingga kuantitas pangan yang akan sampai ke tahap konsumen juga akan berkurang. Aktor yang berperan langsung dalam tahap distribusi diantaranya adalah distributor, agribisnis, transporter,

pedagang, pengecer, vendor, dan sebagainya. Adapun aktor pemerintahan yang berperan dalam sistem distribusi diantaranya adalah Dinas Ketahanan pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan. Tahap selanjutnya dari rantai pasok pangan adalah konsumsi.

**Sistem konsumsi** merupakan tahap akhir pada sistem inti, termasuk di dalamnya pembuangan limbah. Konsumsi pangan dipengaruhi oleh multifaktor, termasuk daya beli, preferensi pangan, pengetahuan gizi, waktu untuk mempersiapkan makanan dan sebagainya. Aktor yang terlibat pada sistem konsumsi adalah konsumen, termasuk penduduk yang ada di suatu daerah, sedangkan aktor pemerintah yang ikut berperan dalam sistem konsumsi diantaranya adalah Dinas Perikanan yang berfokus pada konsumsi ikan, Dinas Peternakan dengan fokus konsumsi hewani dan susu, Dinas Ketahanan Pangan untuk konsumsi makanan pokok, sayur, buah dan pangan lokal. Sistem produksi, agregasi, proses dan distribusi saling terkait dan berpengaruh dengan sistem konsumsi, karena itulah untuk merubah sistem konsumsi dibutuhkan sinergitas dari seluruh aktor terkait.

Sistem inti dipengaruhi oleh elemen sosial dan elemen alam. Subsystem elemen sosial terdiri atas akses ke sumber daya alam, tenaga kerja, *input*, pengetahuan, keuangan, organisasi, hukum dan regulasi, infrastruktur, norma/sosial budaya, dan faktor lainnya. **Akses ke sumber daya alam** melingkupi akses terhadap makanan, air minum dan sebagainya. Beberapa dinas terkait yang memiliki peran diantaranya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan fokus akses terhadap makanan, sedangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang membawahi akses terhadap air minum yang aman dan layak.

Sub-elemen **tenaga kerja** mempengaruhi sistem inti, termasuk di dalamnya kompetensi dan keahlian dari tenaga kerja. Beberapa dinas yang memiliki peran dalam sub-elemen tenaga kerja adalah Dinas Kesehatan yang berperan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai standar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berperan dalam meningkatkan SDM koperasi yang kompeten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berperan dalam memilih SDM konstruksi yang tersertifikasi, serta Dinas Pendidikan yang berperan dalam meningkatkan SDM guru yang kompeten.

Sub-elemen **input** mencakup sarana dan prasarana yang mendukung sistem inti, beberapa dinas terkait yang berperan diantaranya adalah Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang. Sub-elemen **pengetahuan** merupakan bagian penting dalam elemen sosial, karena pengetahuan dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian dan menentukan pola pikir. Beberapa dinas terkait yang berperan dalam peningkatan pengetahuan sesuai dengan lingkup kerja masing-masing adalah Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pariwisata dan Budaya.

Sub-elemen **ekonomi** berpengaruh terhadap sistem inti, khususnya terkait dengan pendanaan maupun peningkatan ekonomi secara umum. Dinas terkait yang berperan dalam sub-elemen ini adalah Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah. Sub-elemen **kesehatan** maupun **faktor lain** juga berpengaruh terhadap sistem inti. Dinas yang berperan dalam sub-elemen kesehatan adalah Dinas Kesehatan, sedangkan yang berperan dalam faktor lain diantaranya adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Badan Pusat Statistik, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Elemen alam berpengaruh terhadap sistem inti dalam sistem pangan, termasuk di dalamnya sub-elemen udara, tanah, ekosistem genetik, air dan iklim. Beberapa dinas yang berperan serta dalam pengelolaan elemen alam adalah Dinas Pertanian yang mengelola elemen lingkungan/ ekosistem genetik dan iklim, Dinas Lingkungan Hidup mengelola elemen udara, tanah, lingkungan/ekosistem dan air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengelola elemen tanah dan lingkungan/ekosistem genetik.

## BAB II LANDASAN HUKUM

### 1. Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, terutama Pasal 1, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.

#### **Pasal 1.**

Ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan **perseorangan**, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta **tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan**”.

#### **Pasal 60 :**

- (1) **Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan** untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk **meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.**

#### **Pasal 61 :**

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip Gizi Seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal;
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

#### **Pasal 62 :**

Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui **pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang (indikator kuantitatif yang ada saat ini adalah pola pangan harapan (PPH)**

## 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan pembagian urusan bidang pangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kab/Kota mencakup 4 Urusan dan 9 sub urusan yaitu:

Tabel 1 Pembagian urusan pemerintahan bidang pangan

No	Sub urusan	Daerah Kabupaten/Kota
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2	<b>Penyelenggaraan Ketahanan Pangan</b>	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. <b>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</b>
3	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten/kota
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

### **3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

#### **Pasal 141**

**Ayat 1 :** Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.

**Ayat 2 :** Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi**

**Gizi :** “Pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan Status Gizi masyarakat, yang dilaksanakan melalui: (a) **pewujudan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman**; (b) penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan dalam rangka penanggulangan masalah pangan dan gizi; (c) penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan; (d) pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan (e) peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal” serta “Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat“.

### **5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Kemamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Pasal 33 dan 34**

#### **Pasal 33 :**

Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan menetapkan standar status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi gizi masyarakat.

Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi, melindungi masyarakat dari gangguan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian atau Kepala badan bersama-sama Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat melakukan penanganan terhadap terjadinya gangguan gizi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar status gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

**Pasal 34 :**

Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan menetapkan Angka Kecukupan Gizi yang ditinjau secara berkala

**6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi**

**Pasal 2 ayat (2):**

Tujuan khusus Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah:

- a) Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat
- b) Meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan
- c) Memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung

**Pasal 5:** Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi diprioritaskan untuk perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan.

**Pasal 6:**

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) kampanye nasional dan daerah; b) advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga; c) dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi; d) pelatihan; e) diskusi; f) intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik); g) intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif); dan h) kegiatan lain.

**7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,**

## **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

**Pasal 12 :** Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

**Pasal 110 :** Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD

**Pasal 130 :** Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja.

**Pasal 180 :** Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

**Pasal 269 :** Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota mencakup rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat aspek beserta indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan outcome Pemerintah Daerah, khususnya bidang pangan seperti yang dicantumkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Aspek beserta indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan *outcome* Pemerintah Daerah

No	Bidang Urusan/Indikator
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
2	Penguatan Cadangan Pangan
3	Penanganan daerah rawan pangan

No	Bidang Urusan/Indikator
Aspek Pelayanan Umum	
	Layanan Umum Wajib Non Dasar
1	Pangan
a.	Ketersediaan pangan utama
b.	Ketersediaan energi dan protein perkapita
c.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

**8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah** (Lampiran); Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi: a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

**9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia**

**Pasal 3 :** Untuk melakukan evaluasi, perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk rata-rata secara makro nasional dan berbagai kebutuhan lainnya, dalam AKG ditetapkan estimasi rata-rata angka kecukupan energi dan rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia.

**Pasal 5 :** AKG digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk: menghitung kecukupan gizi penduduk di daerah; menyusun pedoman konsumsi pangan; mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan; kebutuhan lainnya.

**10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah**

**11. Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020-2024**

Prinsip Dasar Kebijakan Strategis

a. Keadilan

Prinsip keadilan dalam konteks ketahanan pangan dapat diartikan kesamaan hak semua warga masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan pangan yang sesuai bagi dirinya, baik secara kuantitas maupun kualitas.

b. Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus melibatkan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya secara berkelanjutan.

c. Kedaulatan dan Stabilitas Nasional.

Dalam konteks ketahanan pangan kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Stabilitas nasional adalah kestabilan atau situasi yang kondusif baik di bidang sosial budaya, politik, pemerintahan, keamanan, perekonomian, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik, rakyat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintahan bisa dilaksanakan secara optimal.

d. Kemandirian

Terdapat 3 aspek dalam Kemandirian Pangan:

- Produksi pangan yang beraneka-ragam dari dalam negeri
- Menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan
- Memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal yaitu produksi pangan dalam negeri harus dimaksimalkan dengan melihat potensi yang ada

e. **Peran aktif para pihak**

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan multidisiplin. **Seluruh pemangku kepentingan di bidang pangan dan gizi yaitu pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif**, pelaku usaha, filantropi, lembaga swadaya masyarakat, media, akademisi, lembaga pengkajian, komunitas madani di pusat dan daerah serta masyarakat **harus berperan aktif dalam pembangunan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.**

f. Keamanan Pangan

Jaminan keamanan pangan harus diberikan mulai dari aspek produksi pangan, distribusi sampai dengan pemanfaatan pangan (*form farm to fork concept*).

g. Keberlanjutan

Aspek Kebijakan Strategis

a. Ketersediaan Pangan

- Meningkatkan Produksi Pangan yang Beragam
- Memperkuat cadangan pangan untuk antisipasi ancaman ketersediaan pangan
- Menyediakan Pangan yang Aman

b. Keterjangkauan Pangan

- Keterjangkauan Fisik
- Keterjangkauan Ekonomi
- Keterjangkauan Sosial

c. Pemanfaatan Pangan

- Pemenuhan Kebutuhan Gizi
- Memperkuat Sistem Surveilans Pangan dan Gizi
- Jaminan Keamanan Pangan

d. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi

**Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkajian serta komunitas madani di pusat dan daerah).**

**12. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024**

Strategi 1. Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Bergizi dan Aman untuk Keluarga

Strategi 2. Penguatan Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Peningkatan Pangan dan Gizi

**Strategi 3. Perbaikan Konsumsi Gizi Keluarga**

**Strategi 4. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pangan dan Gizi**

## BAB III METODOLOGI

### 3.1 Sumber dan Jenis Data

Data utama yang digunakan dalam kajian ini adalah dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang dipublikasi oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung. Kajian ini juga menggunakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 17 OPD. Jenis dan sumber data yang digunakan disajikan pada Tabel 3.

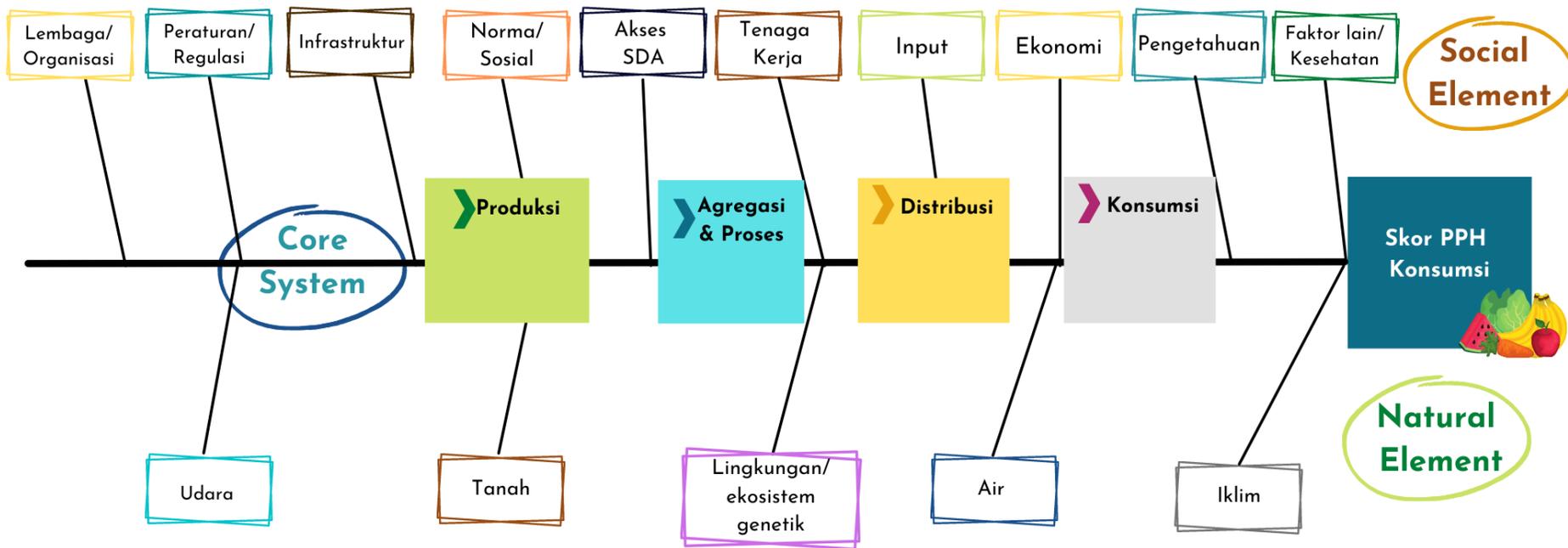
Tabel 3 Jenis dan Sumber Data

No	Jenis Data	Sumber	Tahun
1	Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Bandung	Bappeda	2021-2026
2	Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kabupaten Bandung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2021-2026
3	Draft Ranhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Bandung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2021-2026
4	Renstra Dispora, Kabupaten Bandung	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2021-2026
5	Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kabupaten Bandung	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2021-2026
6	Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial, Kabupaten Bandung	Dinas Sosial	2021-2026
7	Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Bandung	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2021-2026
8	Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kabupaten Bandung	Dinas Pertanian	2021-2026

No	Jenis Data	Sumber	Tahun
9	Renstra Bappeda, Kabupaten Bandung	Bappeda	2021-2026
10	Renstra DP2KBP3A	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2021-2026
11	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bandung	Dinas Lingkungan Hidup	2021-2026
12	Ranwal Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Budaya, Kabupaten Bandung	Dinas Pariwisata dan Budaya	2021-2026
13	Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Kabupaten Bandung	Dinas Kesehatan	2021-2026
14	Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kabupaten Bandung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2021-2026
15	Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Bandung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2021-2026
16	Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Bandung	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2021-2026
17	Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kabupaten Bandung	Dinas Pendidikan	2021-2026
18	Rencana Strategis Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Barat	Badan Pusat Statistik	2020-2024

### **3.2 Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data yang dilakukan pada penyusunan indikator ini terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung, indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bandung, indikator kinerja daerah aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan sistem pangan berdasarkan FAO (2018). Tahapan kedua adalah mengidentifikasi kesesuaian indikator-indikator dalam Renstra 17 OPD. Tahapan ketiga adalah pengelompokan berbagai indikator Renstra 17 OPD meliputi indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan kepada beberapa unsur dalam sistem pangan. Pengelompokan indikator berdasarkan sistem pangan terbagi atas sistem inti (produksi, agregasi, proses, distribusi, konsumsi), elemen sosial, dan elemen alam. Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi seluruh indikator dalam 17 OPD. Hasil identifikasi indikator Renstra 17 OPD yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan disajikan dalam bentuk diagram *fishbone*. Kerangka diagram *fishbone* dapat dilihat pada Gambar 2.



## Indikator program OPD yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan

Gambar 2 Kerangka indikator program OPD yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan

## **BAB IV SITUASI KONSUMSI PANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014-2020**

### **4.1 Perkembangan Konsumsi Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2014-2020**

Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui konsumsi pangan masyarakat. Analisis konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bandung mengacu pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004 yaitu Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) 52 gr/kapita/hari. Acuan ini digunakan untuk analisis konsumsi hingga tahun 2021 karena target pada RPJMD 2016-2021 disusun menggunakan AKE dan AKP tersebut.

Pada tabel 4 dan 5 dibawah ini disajikan perkembangan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Bandung tahun 2014-2020. Jika mengacu pada standar AKE 2.000 kkal/kap/hari dan AKP 52 gr/kap/hari maka konsumsi energi dan protein di Kabupaten Bandung sudah baik selama 7 tahun terakhir. Konsumsi energi paling tinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu 2.347 kkal/kap/hari sedangkan konsumsi energi terendah terdapat pada tahun 2014 yaitu 1.917 kkal/kap/hari. Konsumsi protein tertinggi erdapat pada tahun 2017 yaitu 65,2 gr/kap/hari dan terendah pada tahun 2014 yaitu 53,5 gr/kap/hari. Rata-rata peningkatan konsumsi energi pada tahun 2014-2020 adalah 3% sedangkan peningkatan konsumsi protein adalah 3,2%.

Tabel 4 Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Kabupaten Bandung Tahun 2014-2020

No.	Tahun	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	% AKE	Konsumsi Protein (gr/kap/hari)	% AKP
1	2014	1.917	95,9	53,5	102,9
2	2015	2.183	109,2	58,7	112,9
3	2016	2.321	116,1	62,1	119,4
4	2017	2.347	117,4	65,2	125,4
5	2018	2.193	109,6	61,8	118,9
6	2019	2.201	110	62,1	119,4
7	2020	2.082	104,1	59,2	113,8
Rata-Rata Laju (%)			3		3,2

AKE: 2,000 kkal/kap/hari

Selama 7 tahun terakhir, secara rata-rata skor PPH meningkat 2,3%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata peningkatan skor PPH Provinsi yaitu 1,2%. Skor PPH yang telah mencapai ideal adalah padi-padian dan minyak lemak, adapun skor PPH umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, buah/biji berminyak, gula, dan sayur buah masih belum

mencapai ideal. Pola ini selalu berulang dalam 7 tahun terakhir (Tabel 5). Artinya, pola konsumsi pangan di Kabupaten Bandung cenderung tetap, yaitu kelebihan konsumsi beras, terigu dan minyak (produk gorengan), konsumsi pangan hewani perlu ditingkatkan sedikit lagi dan pangan lainnya (umbi, kacang, sayur buah) masih belum memadai konsumsinya.

Tabel 5 Perkembangan skor PPH Kabupaten Bandung Tahun 2014-2020

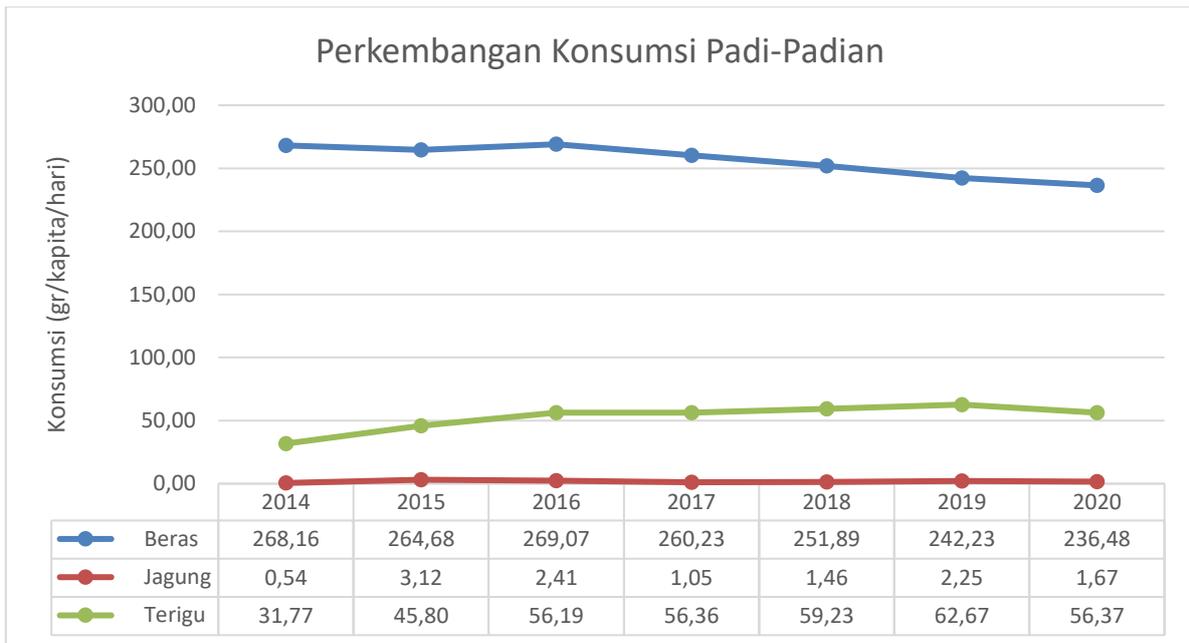
No.	Kelompok Pangan	Tahun							Skor Ideal
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,1	1,0	0,9	1,9	1,2	1,1	1,1	2,5
3	Pangan Hewani	16,8	21,3	21,4	24,0	23,3	23,5	23,2	24,0
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,2	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	1,0
6	Kacang-kacangan	5,6	5,0	5,7	6,6	6,0	6,4	5,9	10,0
7	Gula	1,3	1,8	2,0	2,1	1,2	1,2	1,1	2,5
8	Sayur dan Buah	15,3	19,2	18,9	19,7	21,8	21,0	18,9	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Skor PPH Kabupaten Bandung*</b>		<b>70,4</b>	<b>78,6</b>	<b>79,3</b>	<b>84,6</b>	<b>83,6</b>	<b>83,3</b>	<b>80,3</b>	<b>100</b>
Rata-Rata Laju (%)			11,6	0,9	6,7	-1,2	-0,3	-3,6	
Skor PPH Jawa Barat**		78,3	81,0	84,3	81,6	85,2	84,8	83,7	100
Rata-Rata Laju (%)			3,4	4,1	-3,2	4,4	-0,5	-1,3	

Sumber: Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Kabupaten Bandung 2019, kerjasama DKPP dengan CV MWA

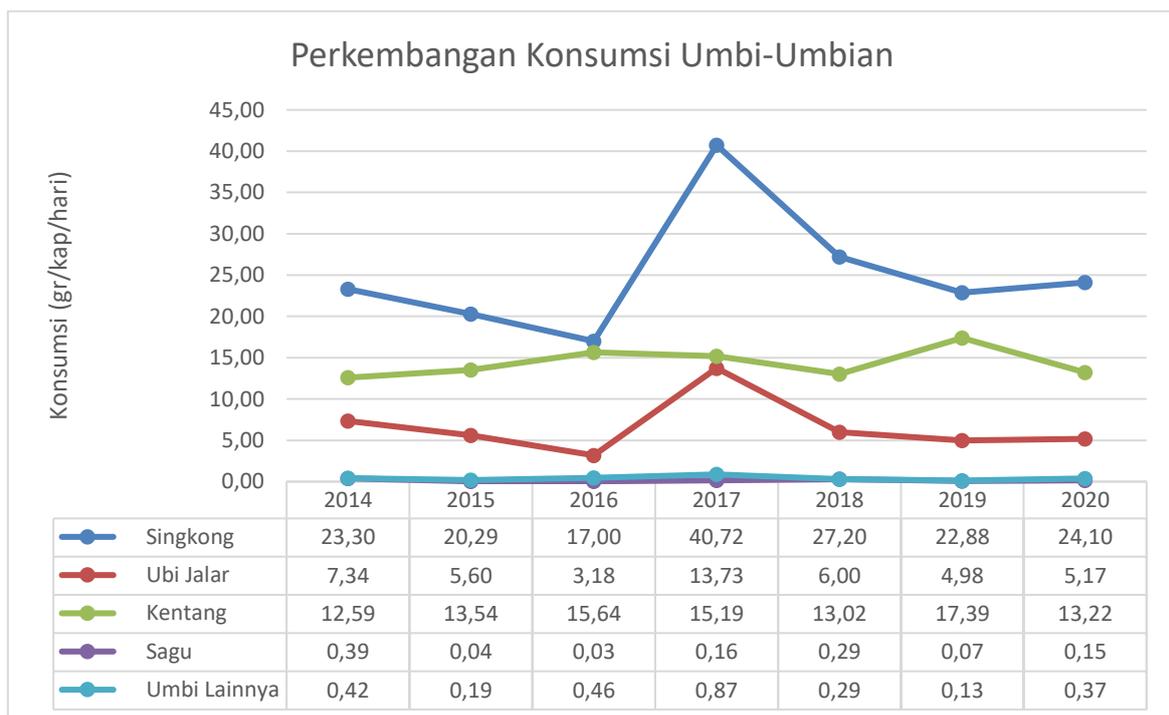
\*AKE: 2,000 kkal/kap/hari

\*\* AKE: 2,150 kkal/kap/hari

Selanjutnya disampaikan perkembangan konsumsi pangan setiap kelompok/jenis pangan (Gambar 3-10). Kelompok pangan padi-padian terdiri dari beras, jagung, dan terigu. Konsumsi beras selama 7 tahun terakhir menunjukkan penurunan sebesar 2,1%. Konsumsi beras pada tahun 2020 sebesar 236,48 gram/kapita/hari. Jumlah ini yang paling rendah sejak tahun 2014. Di lain sisi, terjadi peningkatan konsumsi terigu sebesar 11,3%. Konsumsi terigu pada tahun 2020 sebesar 56,37 gram/kapita/hari Konsumsi jagung menunjukkan peningkatan sebesar 77% selama 7 tahun namun jumlahnya masih sangat sedikit. Dengan demikian, diketahui bahwa pola konsumsi pangan sumber karbohidrat di Kabupaten Bandung bergeser ke arah konsumsi tepung terigu dan olahannya.



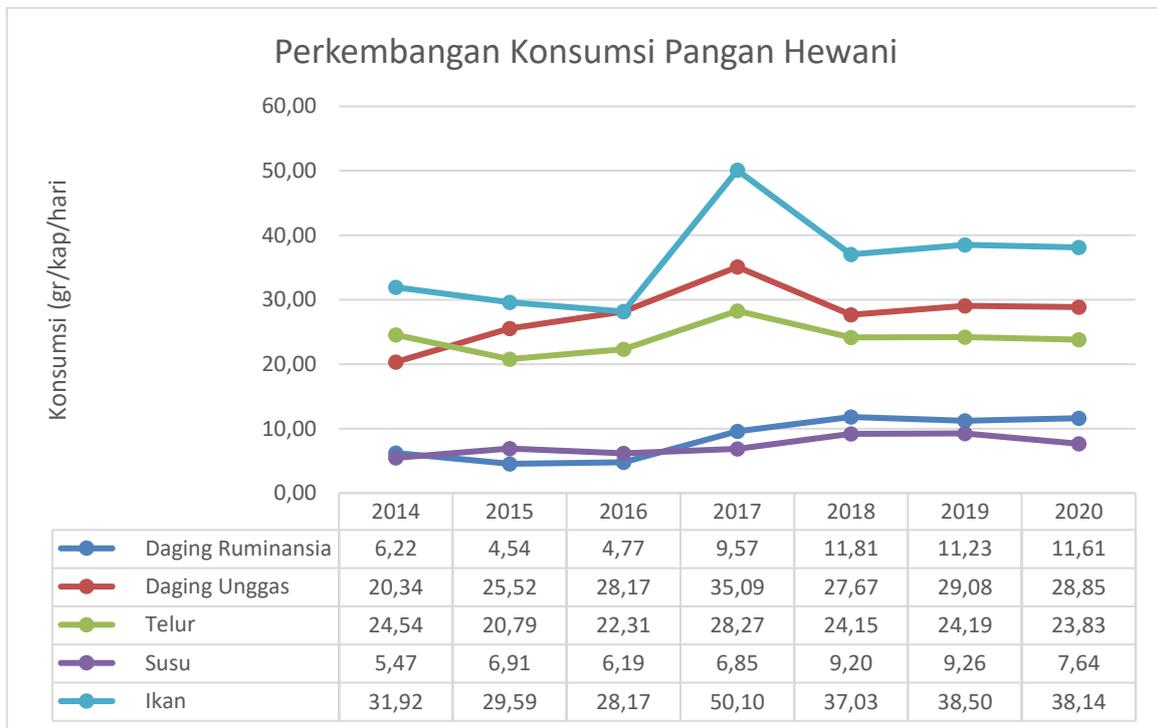
Gambar 3. Perkembangan Konsumsi Padi-Padian Tahun 2014-2020



Gambar 4 Perkembangan Konsumsi Umbi-Umbian Tahun 2014-2020

Konsumsi umbi-umbian masih belum cukup yaitu baru 43% dari anjuran ideal. Meskipun demikian, trendnya menunjukkan konsumsi yang meningkat pada setiap jenis umbi-umbian. Rata-rata selama 7 tahun menunjukkan peningkatan konsumsi singkong sebesar 11%, rata-rata peningkatan konsumsi ubi jalar sebesar 32,6%, rata-rata peningkatan konsumsi

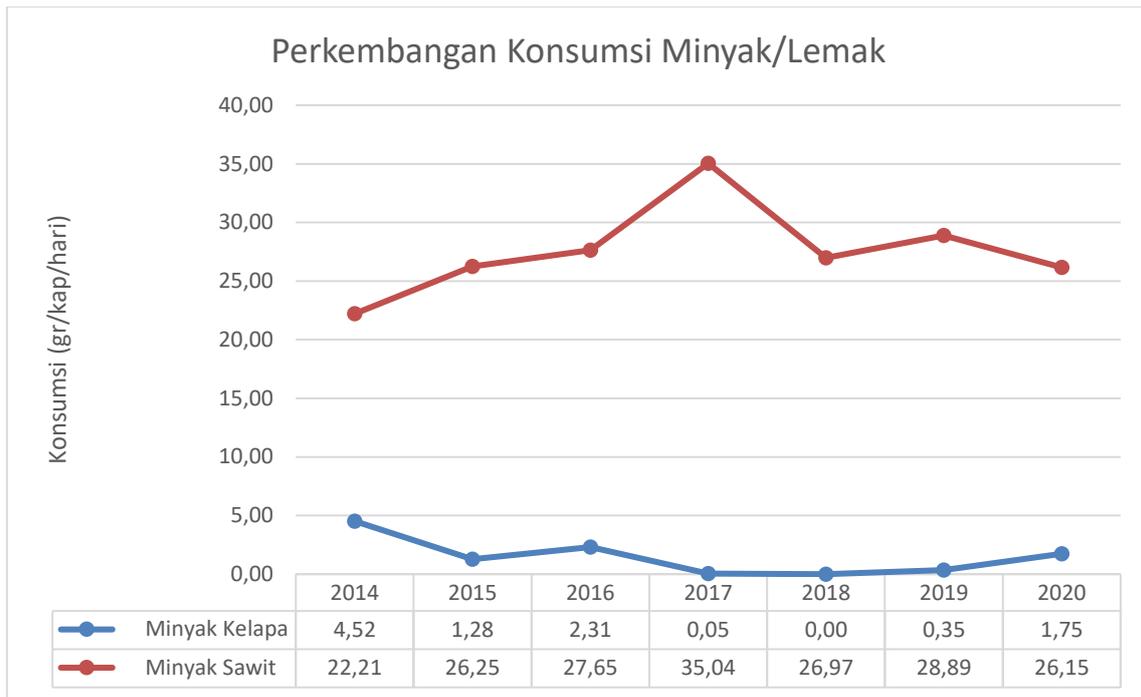
kentang 2,6%, rata-rata peningkatan konsumsi sagu meningkat sebesar 63% dan umbi lainnya rata-rata meningkat sebesar 39,4%. Konsumsi umbi-umbian tertinggi pada tahun 2020 adalah singkong (24,10 gr/kapita/hari) dan kentang (13,22 gr/kapita/hari).



Gambar 5 Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2014-2020

Konsumsi pangan hewani hampir mencapai anjuran ideal. Secara rata-rata selama 7 tahun terakhir, semua jenis pangan hewani menunjukkan peningkatan yang positif. Namun, konsumsi pangan hewani pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan karena dampak Pandemi Covid-19 yang menurunkan daya beli penduduk termasuk anggaran untuk membeli protein hewani.

Peningkatan konsumsi pangan hewani tertinggi selama 7 tahun adalah pada daging ruminansia (16,7%). Dari segi jumlah, konsumsi pangan hewani tertinggi pada tahun 2020 adalah ikan (38,14 gr/kap/hari), diikuti oleh daging unggas (28,85 gr/kapita/hari), telur (23,83 gr/kapita/hari), daging ruminansia (11,61 gr/kapita/hari) dan susu (7,64 gr/kapita/hari). Jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi penduduk adalah ikan mas/nila, ikan mujair, dan ikan tongkol.

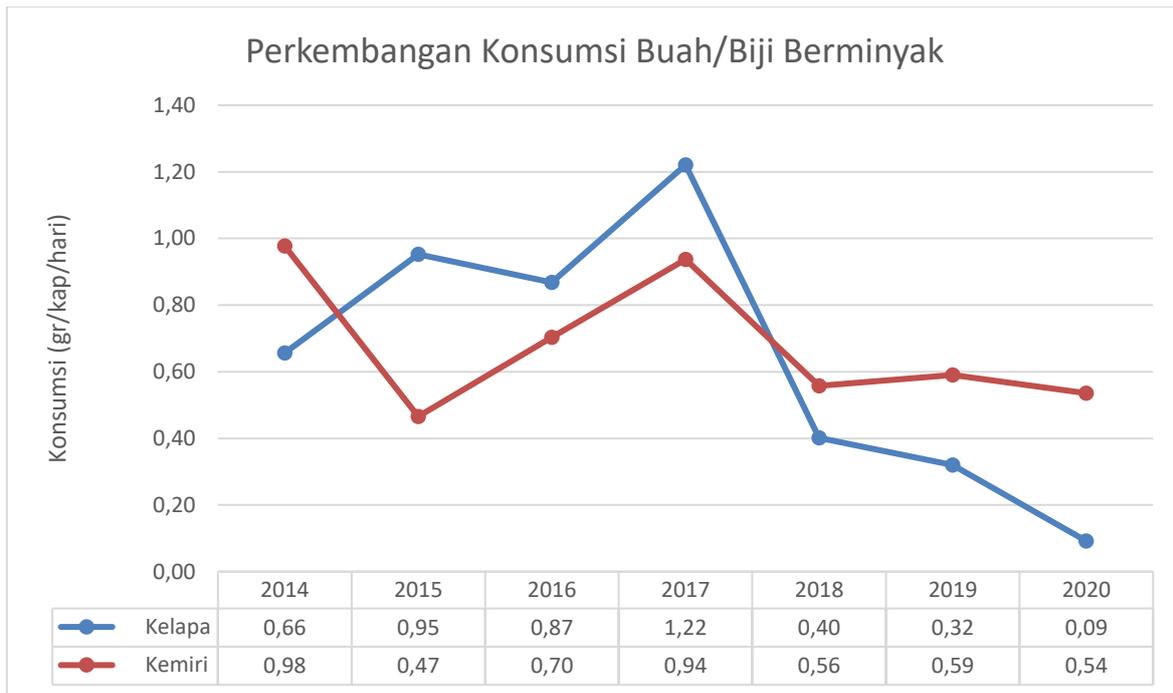


Gambar 6 Perkembangan Konsumsi Minyak dan Lemak Tahun 2014-2020

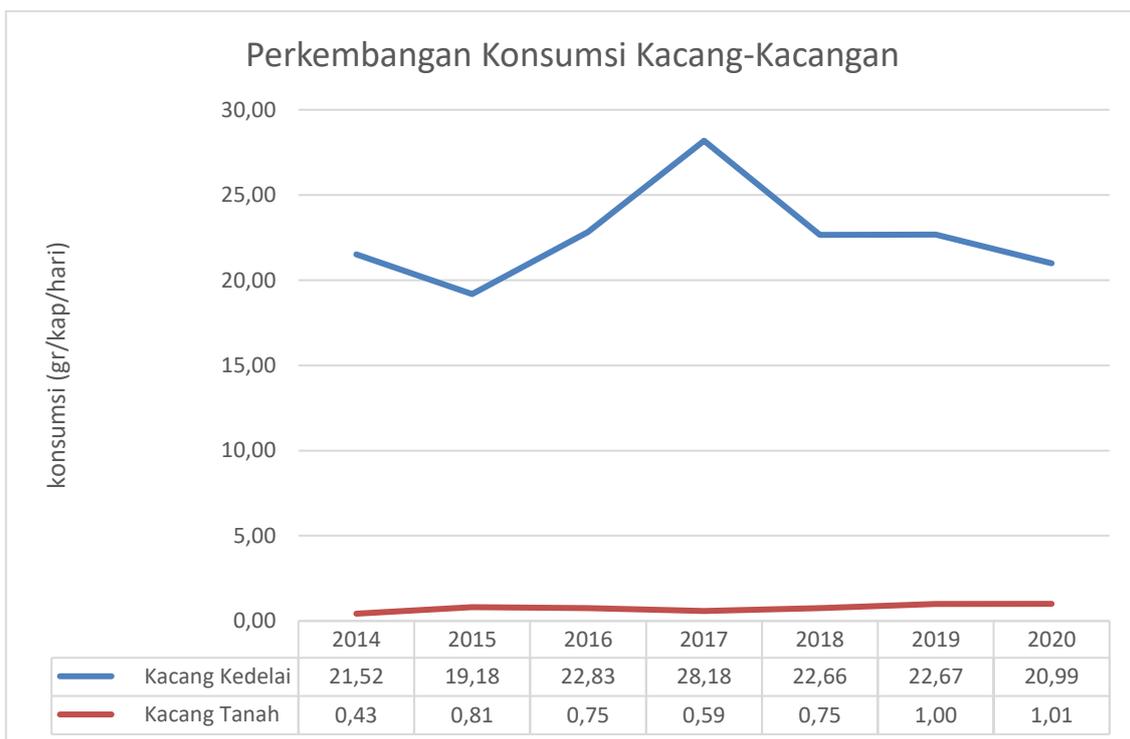
Konsumsi minyak/lemak cenderung berlebih dan trendnya menunjukkan peningkatan selama 7 tahun terakhir namun cenderung turun pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Rata-rata peningkatan konsumsi minyak sawit adalah sebesar 4,1% sedangkan minyak kelapa 35,1% selama tahun 2014-2020.

Sumber utama minyak/lemak di Kabupaten Bandung adalah minyak sawit (26,15 gr/kapita/hari) diikuti dengan minyak kelapa (1,75 gr/kapita/hari). Hal ini menunjukkan penduduk sangat menyukai makanan gorengan/lauk-pauk yang digoreng. Konsumsi makanan gorengan pada tahun 2020 sebesar 25,6 gram/kapita/hari. Dengan demikian, pola konsumsi pangan minyak/lemak adalah minyak sawit (91%) dan minyak kelapa (6%).

Konsumsi buah/biji berminyak masih belum sesuai anjuran ideal dan justru cenderung menurun selama 7 tahun terakhir. Konsumsi kelapa turun -13,6% sedangkan konsumsi kemiri turun sebesar -2% selama 7 tahun. Konsumsi buah/biji berminyak meliputi kemiri (0,59 gram/kapita/hari) dan kelapa (0,09 gr/kapita/hari). Penduduk perlu meningkatkan konsumsi buah/biji berminyak dalam menu hariannya.



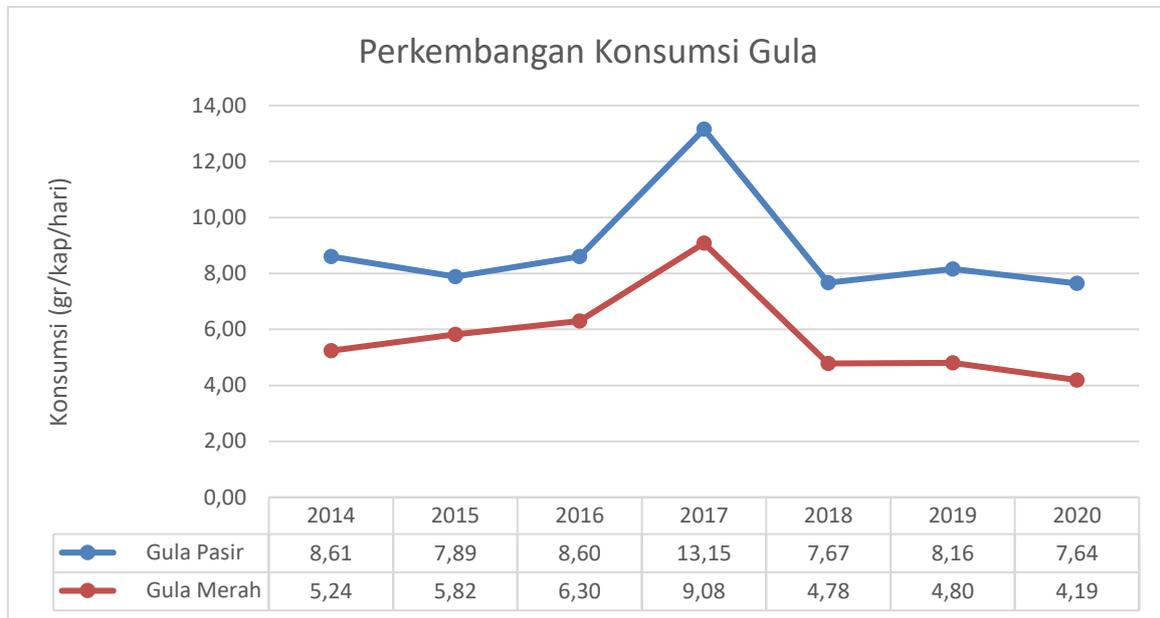
Gambar 7 Perkembangan Konsumsi Buah/Biji Berminyak Tahun 2014-2020



Gambar 8 Perkembangan Konsumsi Kacang-Kacangan Tahun 2014-2020

Konsumsi kacang-kacangan belum sesuai dengan anjuran ideal, namun trendnya menunjukkan peningkatan selama 7 tahun terakhir. Konsumsi kacang tanah meningkat sebesar

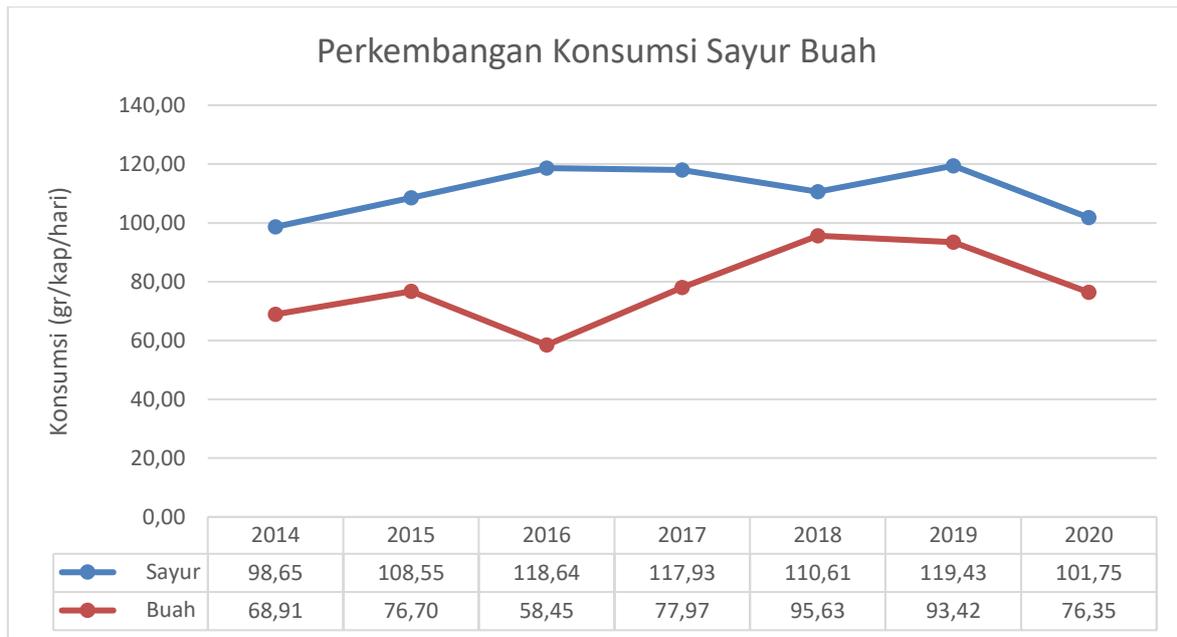
20,2% sedangkan konsumsi kacang kedelai meningkat sebesar 0,8% selama periode 2014-2020. Konsumsi kacang-kacangan paling tinggi adalah kacang kedelai (20,99 gr/kapita/hari), terutama dalam bentuk olahan tahu dan tempe.



**Gambar 9 Perkembangan Konsumsi Gula Tahun 2014-2020**

Konsumsi gula penduduk Kabupaten Bandung belum ideal dan memiliki trend yang cenderung meningkat selama 7 tahun terakhir. Konsumsi gula pasir meningkat sebesar 2% sedangkan gula merah hanya meningkat sebesar 0,6% selama tahun 2014-2020. Konsumsi gula pasir pada tahun 2020 sebesar 7,64 gr/kapita/hari dan gula merah sebesar 4,19%.

Konsumsi sayur dan buah juga perlu ditingkatkan. Sayur dan buah sangat penting untuk menjaga kesehatan dan metabolisme tubuh yang normal karena merupakan sumber vitamin dan mineral. Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah produsen sayur dan buah di Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi yang baik untuk meningkatkan konsumsi penduduk. Konsumsi sayur meningkat rata-rata sebesar 0,9% sedangkan konsumsi buah meningkat rata-rata sebesar 3,8% selama 7 tahun terakhir. Namun, konsumsi sayur dan buah pada tahun 2020 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Konsumsi sayuran lebih tinggi daripada buah-buahan yaitu 101,75 gram/kapita/hari dan 76,35 gr/kapita/hari berturut-turut.



Gambar 10 Perkembangan Konsumsi Sayur Buah Tahun 2014-2020

#### 4.2 Evaluasi Pencapaian Skor PPH

Skor PPH Konsumsi Pangan merupakan salah satu indikator kinerja untuk mencapai Misi Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing, Tujuan Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan pada dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021. Adapun sasaran capaian skor PPH pada tahun 2021 adalah 94 poin, sedangkan capaian tahun ini hanya 80,3 poin.

Tabel 6. Evaluasi Pencapaian Skor PPH Tahun 2021

Indikator Kinerja Skor PPH	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	86	89	92	94
Realisasi	84,6	83,6	83,3	80,3
Capaian	Tidak tercapai			

Target skor PPH Kabupaten Bandung berdasarkan RPJMD untuk tahun 2017- 2021 rata-rata meningkat sebesar 2,75 poin. Namun, faktanya skor PPH sejak tahun 2016-2020 rata-rata meningkat sebesar 0,39%. Target PPH konsumsi pun tidak tercapai setiap tahun, termasuk di tahun ini.

Untuk penyusunan target skor PPH pada periode RPJMD tahun 2021-2026 perlu memperhatikan trend skor PPH selama tahun 2014-2020. Selain itu diperlukan penajaman program kegiatan lintas sektoral yang terkait dengan penganekaragaman konsumsi pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan penduduk.

## **BAB V ANALISIS KESESUAIAN INDIKATOR DALAM RPJMD DAN RENSTRA DENGAN SISTEM PANGAN**

Urusan pangan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung yang termuat dalam Misi kelima Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026. Misi kelima Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah dengan tujuan “Meningkatkan ketahanan pangan daerah” dan sasaran “Menurunkan masalah pangan daerah”, serta dengan indikator skor PPH konsumsi.

Berdasarkan hasil evaluasi skor PPH konsumsi Kabupaten Bandung tahun 2021, target capaian sebesar 92 poin, sedangkan realisasi sebesar 80,3 poin. Hal ini menandakan adanya gap atau ketimpangan sebesar 11,7 poin di tahun 2021. Oleh karena itu, percepatan peningkatan kualitas konsumsi pangan menjadi fokus penting yang harus ditangani bersama. Konvergensi program dan kegiatan antar OPD menjadi penting agar percepatan peningkatan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Bandung terwujud serta target skor PPH konsumsi dapat tercapai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 110 dinyatakan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Pasal 180 juga disebutkan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Atas dasar inilah perlu dilakukan penyusunan indikator khususnya indikator peningkatan kualitas konsumsi pangan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap percepatan target peningkatan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Bandung untuk lima tahun kedepan.

### **5.1. Analisis Kesesuaian Indikator RPJMD dengan Sistem Pangan**

Indikator dalam RPJMD yang dianalisis adalah indikator makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah (aspek kesejahteraan dan aspek pelayanan umum). Berdasarkan hasil analisis, indikator dalam RPJMD secara umum sudah sesuai dengan sistem pangan mulai dari sistem inti, elemen sosial dan elemen alam. Sistem inti terdiri

atas produksi, agregasi/proses, distribusi serta konsumsi. Indikator RPJMD yang sesuai dengan lingkup produksi meliputi ketersediaan pangan utama, peningkatan produksi perikanan budidaya/ikan tangkap/olahan perikanan, peningkatan produksi komoditas sektor pertanian, peningkatan produksi ternak dan unggas, peningkatan status kesehatan hewan ternak dan kualitas kasmavet produk asal hewan. Lingkup agregasi dan proses terdiri atas indikator cadangan pangan/lumbung pangan, serta pemeriksaan produksi produk makanan/minuman industri rumah tangga. Indikator yang sesuai dengan lingkup distribusi meliputi distribusi perdagangan berkualitas/terkelola, ruas jalan termitigasi risiko kemacetan, keamanan pangan segar, serta pemeriksaan (*post market*) produksi produk makanan/minuman/industri rumah tangga. Adapun indikator yang sudah sesuai dengan lingkup konsumsi adalah rasio konsumsi beras, sayur dan buah terhadap total konsumsi ideal.

Indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan seluruh elemen sosial sistem pangan. Indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 juga sudah sesuai dengan kelima elemen alam sistem pangan. Persentase indikator program subsistem/subelemen pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.

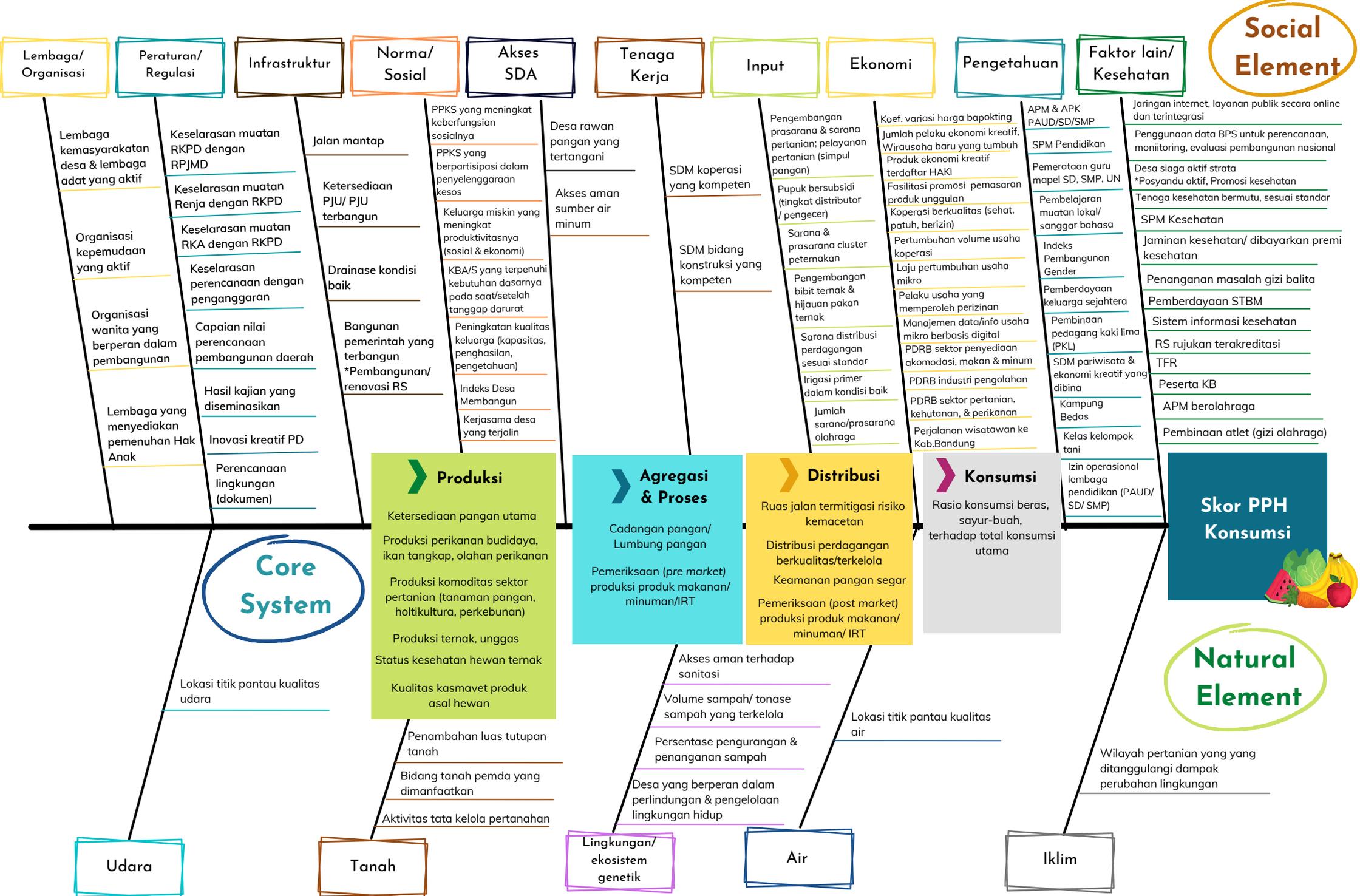
Tabel 7 Persentase indikator program pada masing-masing elemen/sistem sesuai sistem pangan

Subsistem/elemen	Sistem/Elemen	Persentase persistem/elemen	Persentase pertotal sistem pangan
Produksi	Sistem Inti	<b>46,15</b>	6,31
Agregasi & Proses	Sistem Inti	15,38	2,10
Distribusi	Sistem Inti	30,77	4,21
<b>Konsumsi</b>	<b>Sistem Inti</b>	<b>7,69</b>	<b>1,05</b>
Lembaga/organisasi	Elemen sosial	5,56	4,21
Perturan/regulasi	Elemen sosial	11,11	8,42
Infrastruktur	Elemen sosial	5,56	4,21
Norma/sosial	Elemen sosial	9,72	7,36
Akses SDA	Elemen sosial	2,78	2,10
Tenaga kerja	Elemen sosial	2,78	2,10
Input	Elemen sosial	9,72	7,37
Ekonomi	Elemen sosial	18,06	13,68
Pengetahuan	Elemen sosial	15,27	11,58

Subsistem/elemen	Sistem/Elemen	Persentase persistem/elemen	Persentase pertotal sistem pangan
Faktor lain/kesehatan	Elemen sosial	19,44	14,74
Udara	Elemen alam	10	1,05
Tanah	Elemen alam	30	3,16
Lingkungan/ ekosistem genetik	Elemen alam	40	4,21
Air	Elemen alam	10	1,05
Iklim	Elemen alam	10	1,05

Berdasarkan jumlah indikator program pada sistem inti, proporsi program lingkup produksi lebih dominan (46%) dibandingkan dengan lingkup distribusi (30,77%), agregasi dan proses (15,38%), maupun konsumsi (7,69%). Program untuk mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan seharusnya tidak hanya berbasis pada *supply* (produksi), tetapi juga berbasis pada demand atau perubahan perilaku konsumsi yang dikawal oleh lintas OPD terkait.

Mayoritas indikator program pada elemen sosial yang mendukung sistem inti terletak pada sub-elemen kesehatan atau faktor lain (19,44%), sisanya meliputi sub-elemen ekonomi (18,05%), pengetahuan (15,27%), peraturan/regulasi (11,11%), norma/sosial (9,72%), input (9,72%), lembaga/organisasi (5,56%), infrastruktur (5,56%), akses SDA (2,78%), dan tenaga kerja (2,78%). Adapun mayoritas indikator program pada elemen alam yang mendukung sistem inti adalah sub-elemen lingkungan/ekosistem genetik (40%), sisanya terletak pada sub-elemen tanah (30%), udara (10%), air (10%), dan iklim (10%). Berdasarkan Tabel 7 juga dapat diketahui bahwa mayoritas persentase indikator program terhadap total sistem pangan terletak pada subelemen faktor lain/kesehatan (14,74%) dan ekonomi (13,68%), sedangkan yang terendah adalah subsistem konsumsi, serta sub elemen udara, air dan iklim dengan masing-masing sebesar 1,05%. Indikator dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan disajikan pada Gambar 11.



Gambar 11. Indikator program RPJMD yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan

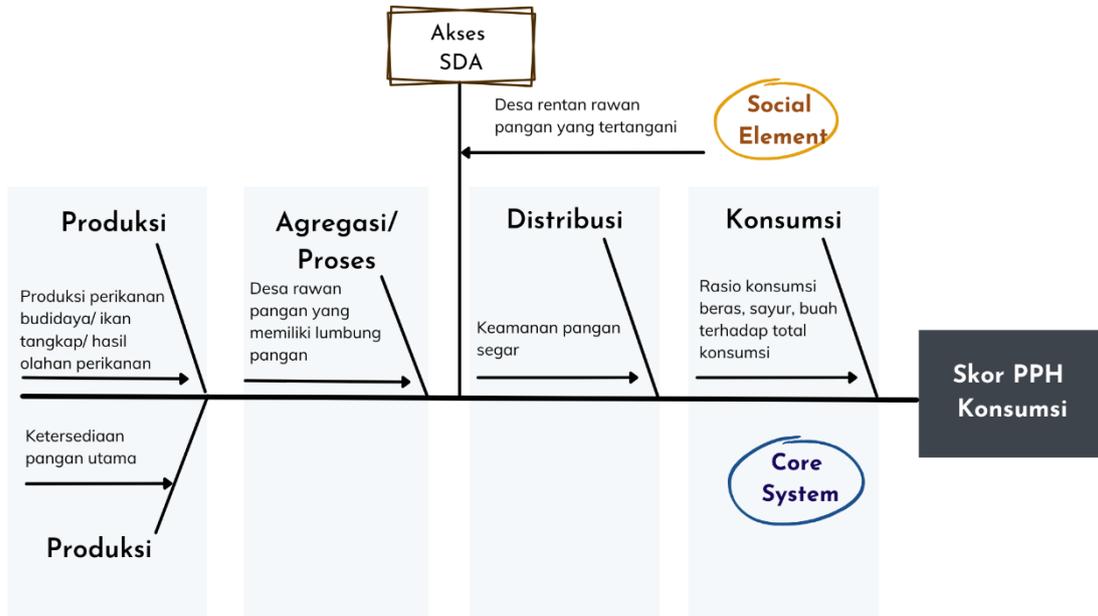
## 5.2. Analisis Kesesuaian Indikator dalam Renstra 17 OPD dengan Sistem Pangan

Indikator kinerja daerah aspek pelayanan umum yang disesuaikan dengan indikator Renstra 17 OPD juga dianalisis dalam kajian ini. Secara umum indikator kinerja daerah aspek pelayanan umum dalam RPJMD sudah sesuai dengan indikator Renstra 17 OPD. Berdasarkan hasil analisis, indikator dalam Renstra 17 OPD secara eksplisit juga telah sesuai dengan sistem pangan, meskipun terdapat beberapa indikator yang dapat dikerucutkan menjadi lebih spesifik untuk peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk.

**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** berperan sebagai *mainsektor* terhadap program peningkatan kualitas konsumsi pangan dan bertindak sebagai *leading*. Indikator kinerja program dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan sistem inti (*core system*), meliputi produksi, agregasi/proses, distribusi dan konsumsi. Indikator lingkup produksi meliputi 1) produksi perikanan budidaya/ikan tangkap/hasil olahan perikanan; dan 2) ketersediaan pangan utama. Indikator dalam lingkup agregasi/produksi meliputi desa rawan pangan yang memiliki lumbung pangan. Adapun indikator dalam lingkup distribusi yaitu keamanan pangan segar, sedangkan lingkup konsumsi meliputi rasio konsumsi beras, sayur, buah terhadap total konsumsi. Indikator kinerja program dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung juga sesuai dengan elemen sosial lingkup akses sumber daya alam, dengan indikator program desa rentan rawan pangan yang tertangani.

Indikator program persentase ketersediaan pangan utama juga dapat difokuskan pada kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah, mengingat kelompok pangan tersebut memiliki ketersediaan yang cukup sedangkan skor PPH kelompok pangan tersebut belum ideal dan cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Indikator sub kegiatan jumlah fasilitasi penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dapat bekerja sama dengan **DinkopUKM** untuk penetapan fokus utama pangan lokal yang akan disediakan, misalnya Dispakan akan berfokus pada penyediaan pangan segar (umbi) sedangkan DinkopUKM berfokus pada penyediaan olahan pangan lokal. Indikator sub kegiatan laporan harga pangan dapat berkoordinasi dengan **Disperindag** dalam penentuan fokus utama jenis pangan yang dilaporkan, misalnya Dispakan berfokus pada pangan segar (umbi, sayur dan buah) sedangkan Disperindag fokus pada beras, gula, hewani, minyak dan sebagainya. Indikator sub kegiatan jumlah CPPD komoditas lain

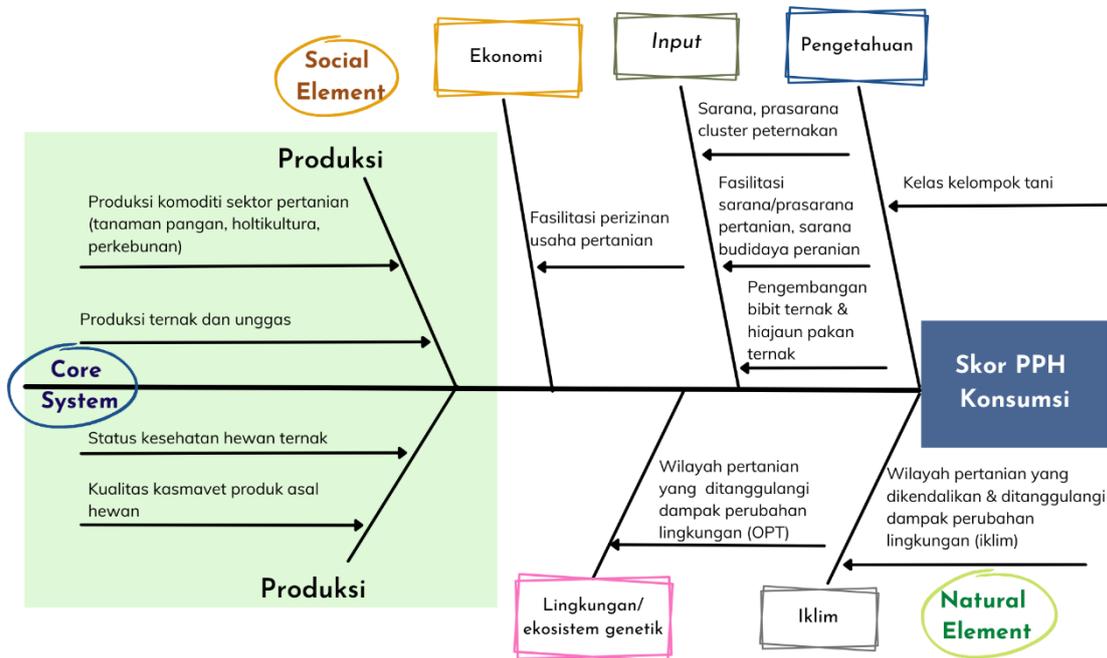
yang tersedia juga dapat difokuskan pada jenis pangan umbi, kacang-kacangan, sayur dan buah. Indikator kinerja program dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung yang sesuai dengan sistem pangan dapat dilihat pada Gambar 12 sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran 2.



Gambar 12 Indikator program Dispakan sesuai sistem pangan

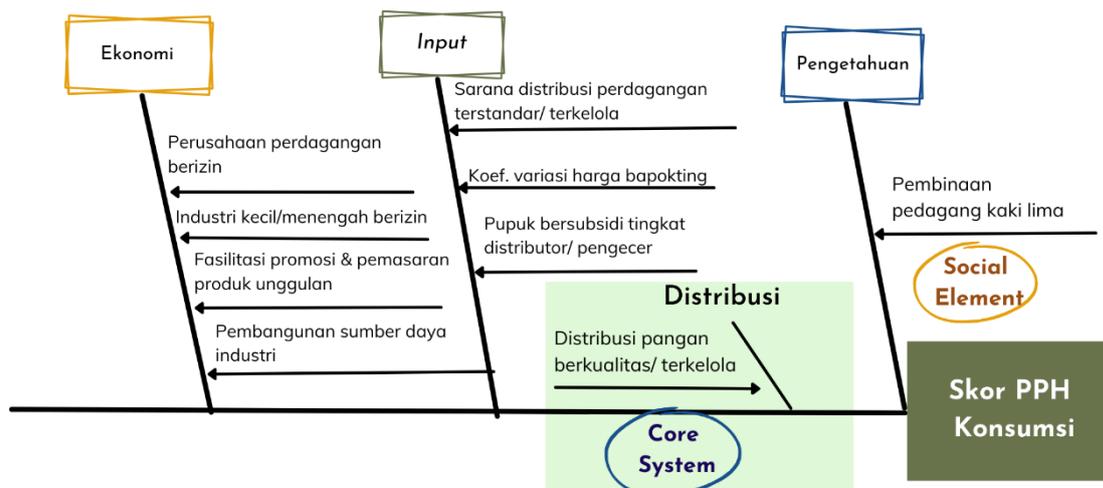
**Dinas Pertanian** memiliki peran dalam lingkup produksi (sistem inti) pada sistem pangan. Indikator kinerja program yang termasuk dalam lingkup produksi meliputi 1) produksi komoditi sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan; 2) produksi ternak dan unggas; 3) peningkatan status kesehatan hewan ternak; serta 4) kualitas kasmet produk asal hewan. Indikator program dalam Dinas Pertanian juga termasuk dalam elemen sosial khususnya lingkup ekonomi, input, dan pengetahuan serta elemen alam meliputi iklim, dan lingkungan/ekosistem genetik. Indikator kegiatan cakupan penyuluhan pertanian dapat dimasukkan materi spesifik tentang pengendalian *food loss* (pasca panen), hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan hasil produksi para petani serta pengendalian terhadap sampah yang dihasilkan pada rantai awal produksi. Pengendalian pasca panen diharapkan bukan hanya untuk pangan pokok seperti padi/beras, tetapi juga berfokus pada pangan segar yang lain seperti sayur dan buah. Indikator kinerja program dalam Dinas Pertanian Kabupaten Bandung yang sesuai

dengan sistem pangan dapat dilihat pada Gambar 13 sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan dan rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran 3.



Gambar 13 Indikator program Distan sesuai sistem pangan

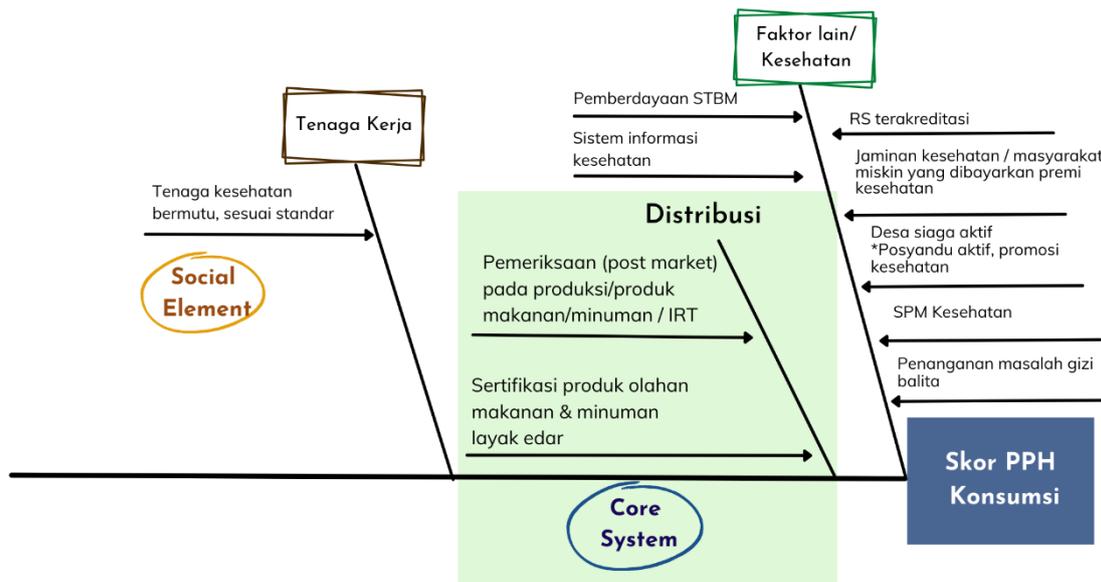
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan** memiliki peran dalam lingkup distribusi (sistem inti) pada sistem pangan, dengan indikator distribusi pangan berkualitas dan terkelola. Selain sistem inti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berperan dalam lingkup ekonomi, input, dan pengetahuan pada elemen sosial yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator kegiatan persentase pemenuhan ketersediaan Bapokting Disperindag dapat bekerjasama dengan **Dispakan** dalam menentukan jenis pangan yang menjadi fokus per dinas agar lebih efektif, misalnya Dispakan fokus terhadap pangan segar (umbi, sayur dan buah), sedangkan Disperindag fokus pada beras, gula, hewani, minyak dan sebagainya. Hal ini juga dapat diterapkan pada indikator sub kegiatan pemantauan harga dan stok Bapokting. Indikator kinerja program Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 14, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran 4.



Gambar 14 Indikator program Disperindag sesuai sistem pangan

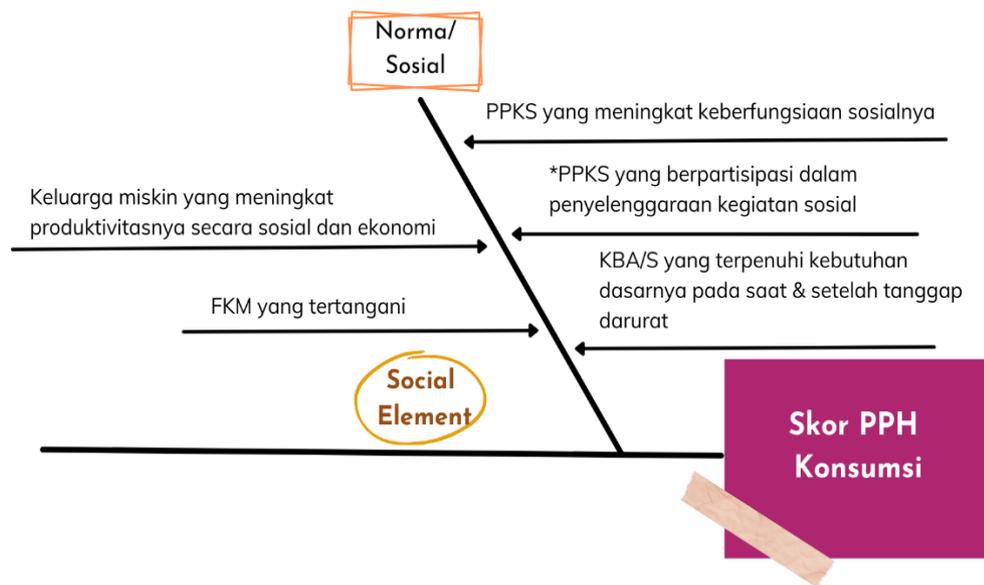
**Dinas Kesehatan** memiliki peran dalam lingkup distribusi (sistem inti) pada sistem pangan dengan indikator program 1) pemeriksaan (*post market*) pada produksi dan produk makanan, minuman industri rumah tangga; serta 2) sertifikasi produk olahan makanan dan minuman layak edar. Dinas Kesehatan juga berperan dalam lingkup kesehatan dan tenaga kerja pada sistem sosial yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator sub kegiatan jumlah informasi (konten) promosi kesehatan dapat dimasukkan konten mengenai isi piringku dan gizi seimbang menurut siklus hidup, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, usia subur, dewasa, dan lansia.

Indikator sub kegiatan puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar juga harus sesuai kompetensi, sehingga dapat ditambah sub kegiatan persentase ahli gizi terhadap total nakes atau persentase ahli gizi di setiap puskesmas. Hal ini disebabkan ahli gizi memiliki peran penting dalam edukasi terkait diet, tidak hanya untuk diet untuk orang sakit tetapi juga diet seimbang sesuai siklus hidup. Indikator kegiatan jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil juga dapat ditambah indikator sub kegiatan yang lebih spesifik yaitu persentase bumil anemia dan bumil anemia yang mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga dapat diketahui seberapa besar bumil yang anemia karena kekurangan zat besi dan dapat diberi edukasi mengenai peningkatan konsumsi, khususnya konsumsi makanan tinggi zat besi. Lebih lanjut mengenai indikator kinerja program sesuai sistem pangan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Gambar 15, sedangkan indikator kegiatan dan sub kegiatan serta rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran 5.



Gambar 15 Indikator program Dinkes sesuai sistem pangan

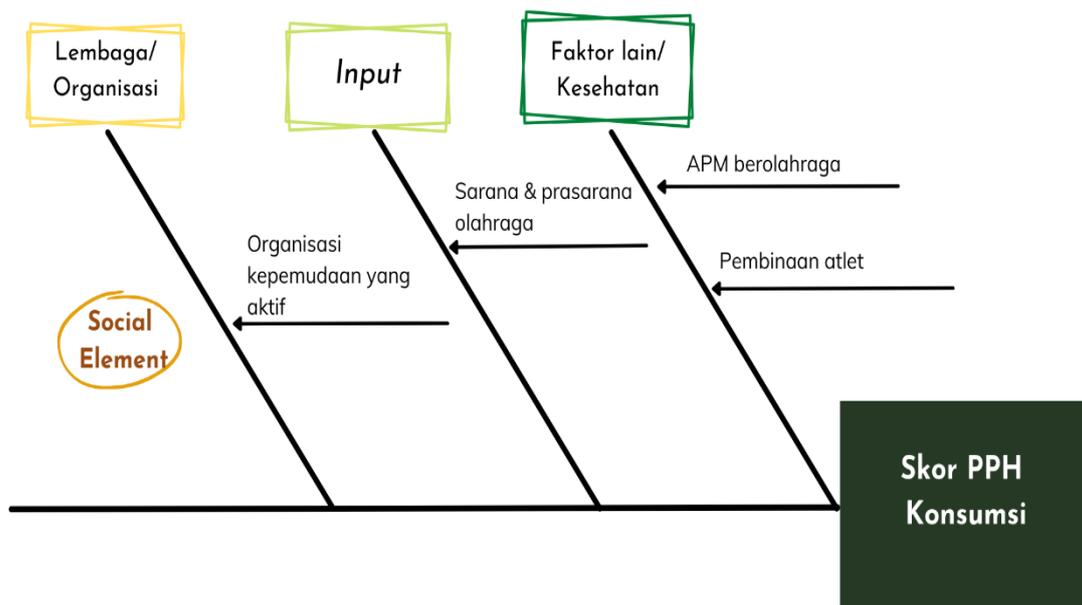
**Dinas Sosial** berperan dalam lingkup sosial/norma (elemen sosial) pada sistem pangan. Indikator yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan meliputi 1) keluarga miskin yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi; 2) FKM yang tertangani; 3) PPKS yang meningkat keberfungsian sosialnya; 4) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat. Indikator sub kegiatan jumlah jiwa korban bencana yang memperoleh bantuan permakanan dapat ditambahkan indikator sub kegiatan yang lebih spesifik yaitu jumlah jiwa korban terdampak bencana yang memperoleh bantuan permakanan sesuai prinsip gizi seimbang, khususnya penyediaan sayur dan buah. Hal ini mempertimbangkan bantuan BLT non tunai yang seringkali hanya berfokus pada beras, telur dan mengesampingkan sayur dan buah. Terlebih di tahun 2021 ini masih mewabah virus COVID-19 dan korban terdampak memerlukan makanan yang tinggi zat gizi dan vitamin untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hal tersebut juga sesuai dengan Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19, khususnya penyediaan pangan untuk pasien/ korban terdampak, himbauan untuk makan teratur dan bergizi, serta konsumsi buah dan sayur yang cukup. Indikator kinerja program sesuai sistem pangan Dinas Sosial disajikan pada Gambar 16 sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran 6.



Gambar 16 Indikator program Dinsos sesuai sistem pangan

**Dinas Kepemudaan dan Olahraga** berperan dalam lingkup kesehatan/faktor lain, input, dan organisasi (elemen sosial) berdasarkan sistem pangan. Indikator kinerja program lingkup kesehatan/ faktor lain meliputi APM berolahraga dan pembinaan atlet. Indikator kinerja program berdasarkan lingkup input adalah sarana dan prasarana olahraga sedangkan lingkup organisasi meliputi organisasi kepemudaan yang aktif.

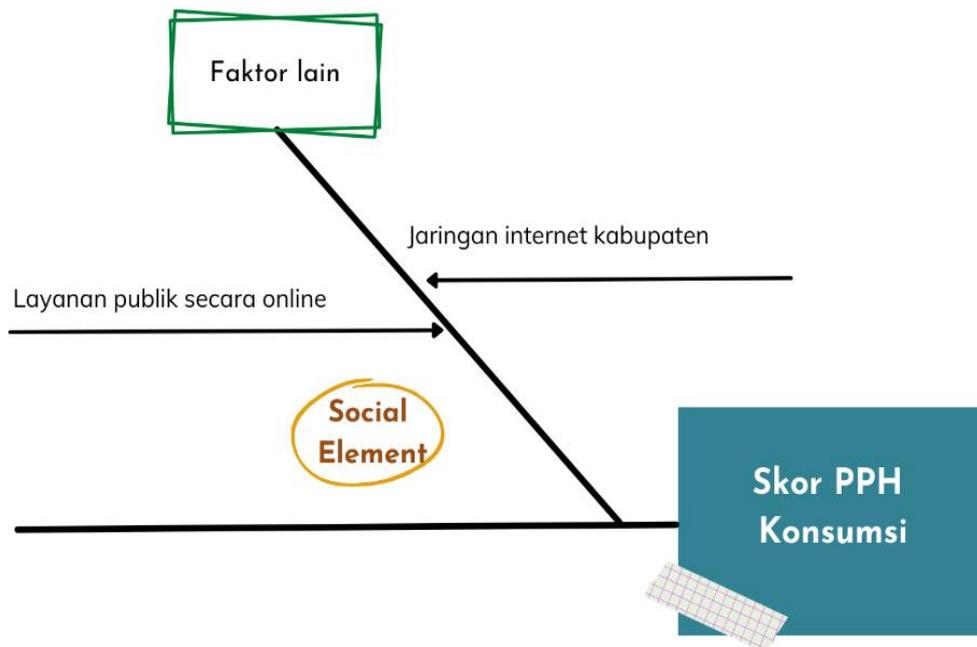
Indikator program persentase organisasi kepemudaan yang aktif juga dapat ditambahkan sub kegiatan spesifik berupa jumlah organisasi kepemudaan pelopor pangan lokal serta fasilitasi terhadap organisasi kepemudaan pelopor pangan lokal. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemuda maupun organisasi yang turut serta mempromosikan pangan lokal dan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator program jumlah pembinaan atlet berprestasi juga dapat ditambahkan indikator sub kegiatan berupa persentase atlet yang diberikan pelayanan gizi olahraga serta persentase cabang olahraga yang memiliki ahli gizi. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk dukungan, tidak hanya untuk peningkatan kualitas konsumsi para atlet, tetapi juga untuk meningkatkan performa atlet melalui konsumsi diet yang sesuai dengan cabang olahraga. Diagram *fishbone* indikator program Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan disajikan pada Gambar 17, sedangkan indikator kegiatan/subkegiatan serta rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran 7.



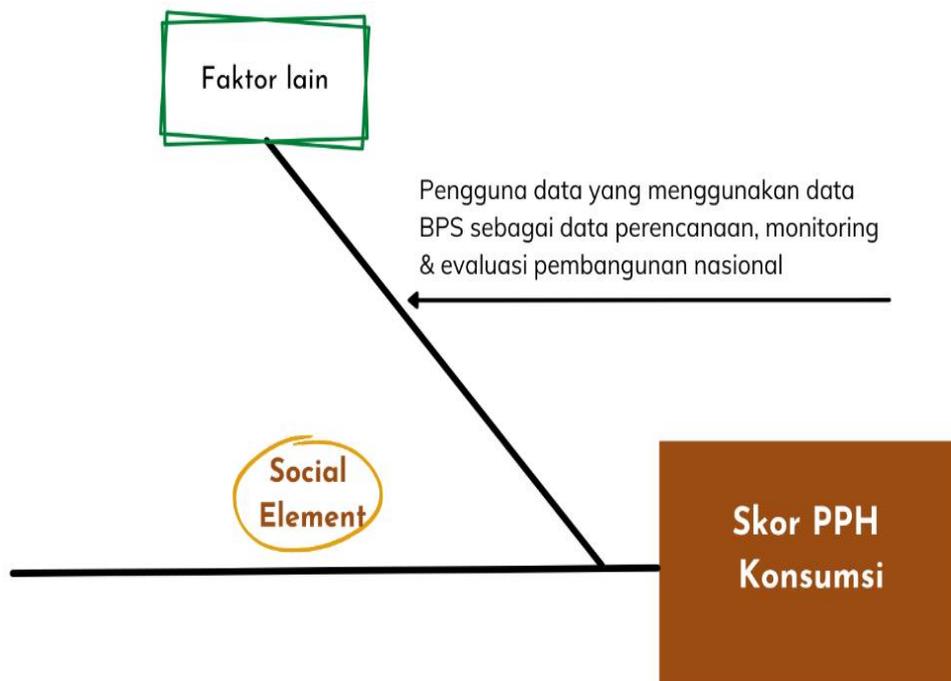
Gambar 17 Indikator program Dispora sesuai sistem pangan

Berdasarkan data dari BPS (2020), persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menguasai/ memiliki telepon seluler (hp)/ komputer sejumlah 76,76%, sedangkan persentase penduduk yang mengakses internet termasuk media sosial sebesar 61,38%. Hal ini menunjukkan diperlukan penambahan program agar informasi terkait pangan dan gizi dapat tepat sasaran. **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** berperan dalam lingkup faktor lain (elemen sosial) untuk peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator program yang sesuai meliputi jaringan internet kabupaten dan layanan publik secara online. Indikator jumlah aktivitas penyelenggaraan konten agenda prioritas pemerintah daerah dan pusat melalui media diseminasi informasi dapat ditambahkan indikator sub kegiatan spesifik yaitu jumlah konten pangan, gizi dan kesehatan dari dinas terkait.

Indikator persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dapat ditambahkan indikator sub kegiatan jumlah kelembagaan masyarakat yang menyediakan layanan konsultasi terkait B2SA. Pembuatan konten pangan, gizi dan kesehatan serta layanan konsultasi B2SA dapat bekerja sama dengan **Dispakan, Distan, Dinkes, Disperindag** dan sebagainya. Diagram *fishbone* indikator program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai sistem pangan dapat dilihat pada Gambar 18, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi disajikan pada Lampiran 8.



Gambar 18 Indikator program Diskominfo sesuai sistem pangan

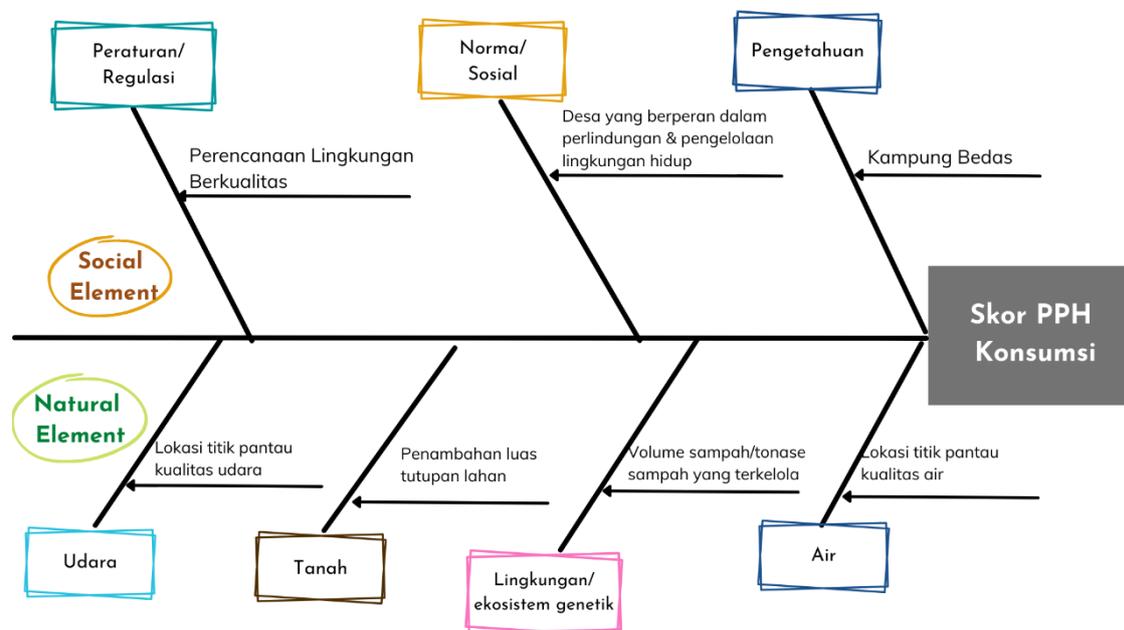


Gambar 19 Indikator program BPS sesuai sistem pangan

**Badan Pusat Statistik** berperan sebagai pendukung dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan, khususnya pada elemen sosial (faktor lain). Indikator program yang termasuk dalam sistem pangan adalah pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai data perencanaan, monitoring & evaluasi pembangunan nasional. Diagram

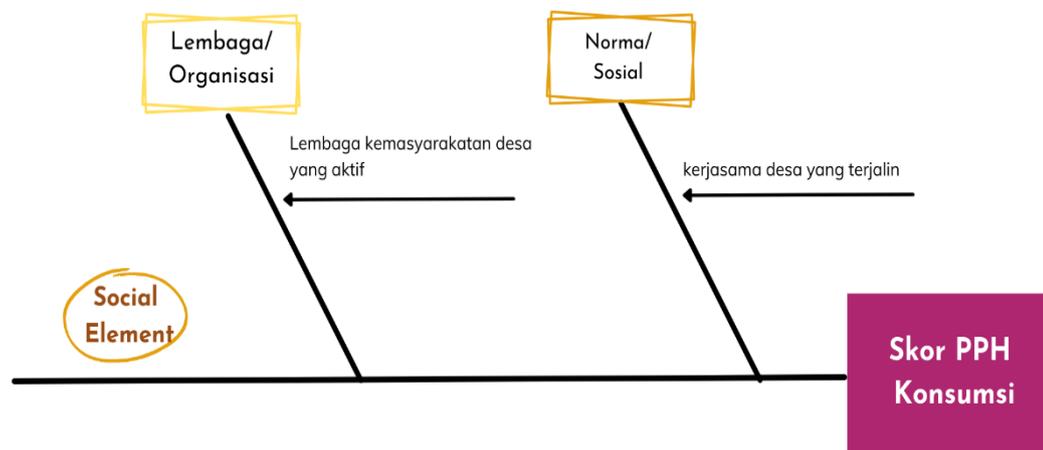
*fishbone* indikator program BPS yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 19, sedangkan indikator kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 9.

**Dinas Lingkungan Hidup** memiliki peran dalam elemen sosial dan elemen alam yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi penduduk. Indikator program elemen sosial meliputi pengetahuan, norma/sosial, dan regulasi/peraturan. Adapun indikator program yang termasuk dalam elemen alam meliputi air, udara, lingkungan/ekosistem genetik, tanah, dan udara. Indikator program dalam elemen sosial diantaranya adalah 1) kampung badas; 2) desa yang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta 3) perencanaan lingkungan berkualitas. Adapun indikator program yang termasuk elemen alam adalah 1) lokasi titik pantau kualitas air; 2) lokasi titik pantau kualitas udara; 3) penambahan luas tutupan lahan; dan 4) volume sampah/ tonase sampah yang terkelola. Indikator kegiatan persentase penanganan dan pengurangan volume sampah DLH dapat bekerja sama dengan **Distan**, khususnya penanganan sampah (*food loss*) pada rantai awal produksi, sehingga penanganan sampah dapat terintegrasi dari hulu ke hilir dan dapat mengurangi total sampah yang ada. Diagram *fishbone* indikator program DLH yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 20, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 10.



Gambar 20 Indikator program DLH sesuai sistem pangan

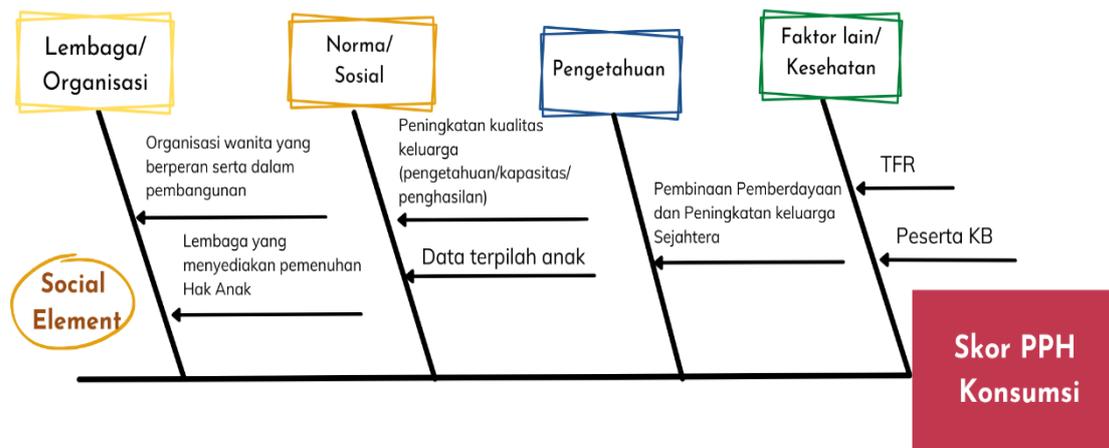
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** memiliki peran dalam elemen sosial khususnya lingkup sosial/norma dan organisasi/lembaga yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator program DPMD yang termasuk dalam elemen sosial meliputi 1) kerjasama desa yang terjalin; 2) lembaga kemasyarakatan desa yang aktif. Indikator sub kegiatan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Posyandu) dapat ditambah indikator lebih spesifik yaitu jumlah fasilitasi posyandu yang mendapat alat peraga/media penyuluhan dan edukasi gizi sesuai siklus hidup. Alat peraga/media gizi dibutuhkan untuk memudahkan ahli gizi dalam memberikan penyuluhan sehingga diharapkan materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh ibu atau peserta posyandu. Diagram *fishbone* indikator program DPMD yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 21, sedangkan indikator kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 11.



Gambar 21 Indikator program DPMD sesuai sistem pangan

**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** berperan dalam lingkup kesehatan/faktor lain, pengetahuan, norma/sosial, dan lembaga (elemen sosial) yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator program DP2KBP3A yang termasuk dalam elemen sosial meliputi 1) TFR; 2) Program KB; 3) Pembinaan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; 4) peningkatan kualitas keluarga (pengetahuan/kapasitas/penghasilan); 5) data terpilah anak; 6) organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan; serta 7) lembaga yang menyediakan pemenuhan hak anak. Indikator kegiatan jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang

mendapat promosi dan sosialisasi tentang orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga dapat ditambahkan materi sosialisasi tentang perbaikan konsumsi pangan/diet sesuai siklus hidup dan B2SA. Begitu pula indikator jumlah kegiatan yang berintegrasi di Kampung KB juga dapat ditambahkan sub kegiatan berupa jumlah sosialisasi tentang edukasi gizi seimbang, PHBS, dan promosi kesehatan. Indikator program persentase lembaga yang menyediakan pemenuhan hak anak dapat ditambahkan indikator sub kegiatan spesifik berupa jumlah lembaga pendampingan hak anak yang memberikan edukasi terkait gizi dan program kesehatan anak (bayi, balita, anak-anak). Hal ini dapat dilakukan karena pangan merupakan salah satu kebutuhan anak yang harus terpenuhi guna pertumbuhan dan perkembangan anak. Indikator sub kegiatan jumlah data/dokumen data dan informasi keluarga juga dapat ditambahkan indikator spesifik yaitu jumlah data/ persentase pernikahan usia dini. Hal ini diperlukan karena pernikahan dini akan sangat rentan terhadap ketahanan keluarga, termasuk di dalamnya ketahanan pangan rumah tangga. Diagram *fishbone* indikator program DP2KBP3A yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 22, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan dan rekomendasi disajikan pada Lampiran 12.

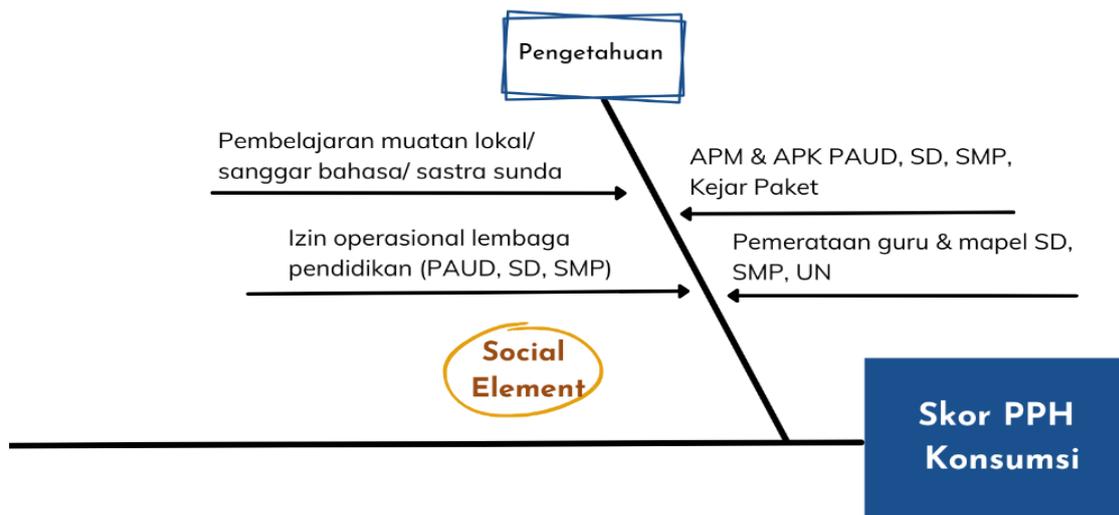


Gambar 22 Indikator program DP2KBP3A sesuai sistem pangan

**Dinas Pendidikan** memiliki peran dalam elemen sosial khususnya lingkup pengetahuan untuk mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan. Indikator program dalam Disdik yang termasuk dalam elemen sosial meliputi 1) APM dan APK PAUD, SD, SMP, Kejar Paket; 2) Pemerataan guru & mapel SD, SMP, UN; 3) Pembelajaran muatan lokal/sanggar bahasa/sastra sunda; 4) izin operasional lembaga pendidikan PAUD, SD, SMP.

Terdapat beberapa indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat ditambahkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Program pertama yang dapat ditambahkan adalah pengelolaan pendidikan dengan indikator kegiatan pengelolaan pendidikan PAUD dan TK. Adapun indikator sub kegiatan untuk program tersebut meliputi 1) Persentase guru PAUD/TK yang mendapat pembinaan pengetahuan gizi seimbang; 2) Persentase PAUD/TK yang telah mengajarkan tentang gizi seimbang dalam kegiatan pembelajaran; 3) Persentase PAUD/TK yang menyediakan makanan (*school lunch program*). Disdik dapat bekerja sama dengan **Dinkes** dan **Dispakan** dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut. Indikator kegiatan kedua adalah pengelolaan pendidikan sekolah dasar dengan indikator sub kegiatan persentase sekolah yang menyediakan makanan (*school feeding program*). Indikator kegiatan ketiga yaitu pengelolaan pendidikan SMP dengan indikator sub kegiatan 1) jumlah renovasi kantin sekolah; 2) persentase sekolah yang mendapat penyuluhan kantin sehat; 3) penyediaan dukungan sarana/prasarana kantin sehat (sanitasi *hygiene* dan B2SA); 4) persentase siswa SMP yang mendapat penyuluhan gizi seimbang dan promosi kesehatan.

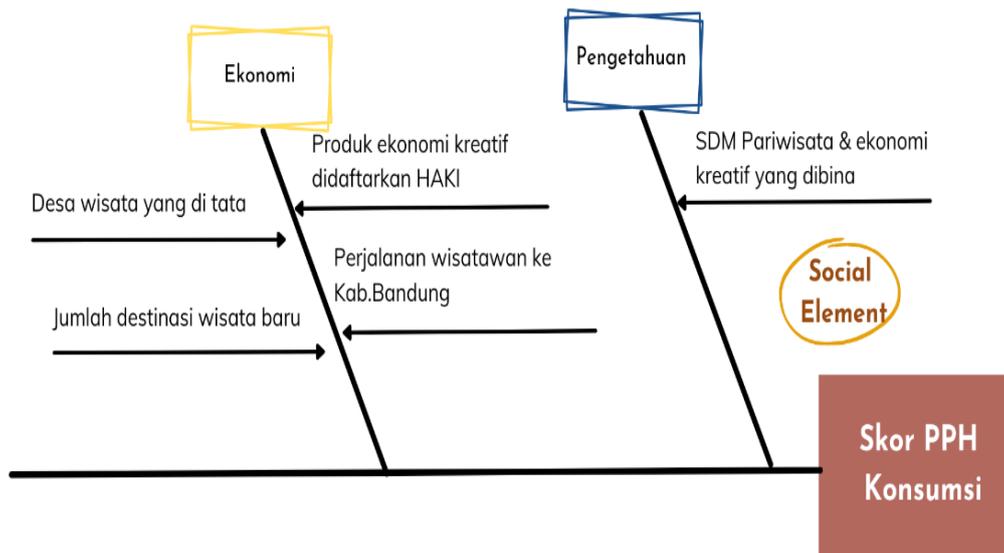
Program selanjutnya yang dapat ditambahkan adalah pengembangan kurikulum dengan indikator sub kegiatan yaitu penetapan materi tentang gizi seimbang/ B2SA dalam kurikulum muatan lokal. Penetapan kurikulum terkait materi gizi seimbang/B2SA diperlukan agar anak sedari dini mengenal dan memiliki pengetahuan gizi, sehingga diharapkan anak dapat lebih mudah untuk menerapkan praktik makan yang sehat. Disdik dapat bekerjasama dengan **Dinkes** dan **Dispakan** dalam penetapan kurikulum tentang materi gizi seimbang tersebut. Diagram *fishbone* indikator program Disdik yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 23, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi disajikan pada Lampiran 13.



Gambar 23 Indikator program Disdik sesuai sistem pangan

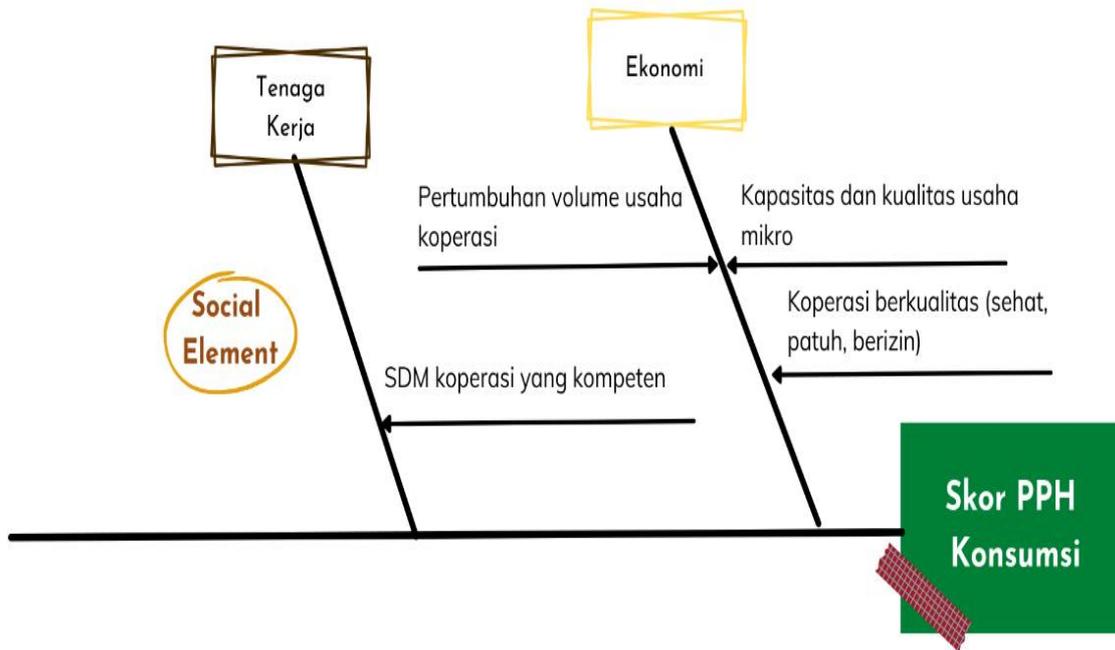
**Dinas Pariwisata dan Budaya** berperan dalam lingkup pengetahuan dan ekonomi (*elemen sosial*) dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator program dalam Disparbud yang sesuai dengan elemen sosial meliputi 1) SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina; 2) produk ekonomi kreatif didaftarkan HAKI; 3) perjalanan wisatawan ke Kabupaten Bandung; 4) desa wisata yang ditata; 5) jumlah destinasi wisata baru. Indikator sub kegiatan 1) jumlah promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya dapat ditambah indikator spesifik yaitu jumlah promosi wisata kuliner melalui media cetak, elektronik, dan sebagainya; serta 2) jumlah pemasaran wisata kuliner yang terfasilitasi. Begitupun dengan indikator jumlah dokumen penetapan daya tarik wisata dapat ditambah dengan indikator sub kegiatan yang lebih spesifik yaitu jumlah dokumen penetapan daya tarik wisata kuliner.

Indikator spesifik selanjutnya yang dapat ditambahkan adalah jumlah dokumen perencanaan penetapan standar wisata kuliner yang berpedoman pada prinsip B2SA. Hal ini selain dapat menarik wisatawan luar/lokal dengan pangan yang aman dan bergizi juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dukungan terhadap peningkatan perbaikan konsumsi pangan penduduk. Indikator sub kegiatan selanjutnya yang dapat ditambahkan adalah jumlah kawasan/pelaku usaha wisata kuliner yang dikembangkan dan diberi edukasi tentang B2SA. Diagram *fishbone* indikator program Disparbud yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 24, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi disajikan pada Lampiran 14.

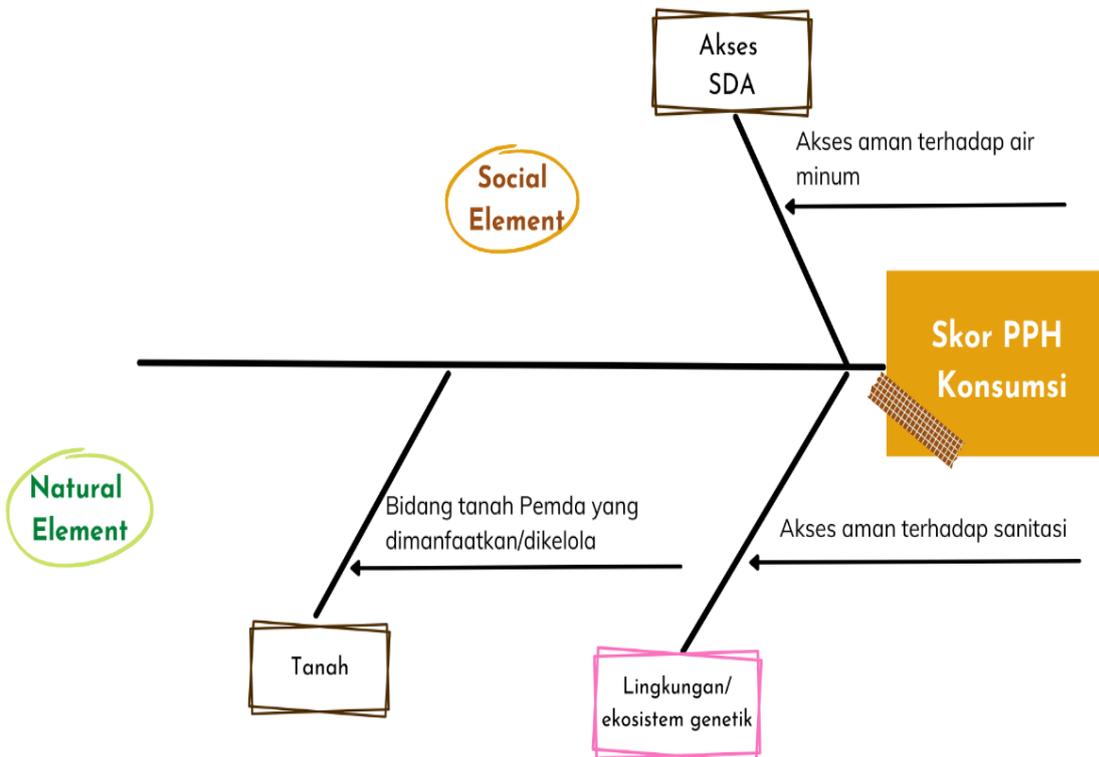


Gambar 24 Indikator program Disparbud sesuai sistem pangan

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** berperan dalam lingkup ekonomi dan tenaga kerja (elemen sosial) yang mendukung peningkatan perbaikan konsumsi pangan penduduk. Indikator program yang termasuk dalam elemen sosial meliputi 1) kapasitas dan kualitas usaha mikro; 2) koperasi berkualitas (sehat, patuh, berizin); 3) pertumbuhan volume usaha koperasi; 4) SDM koperasi yang kompeten. DinkopUKM dapat menambahkan indikator spesifik yaitu persentase usaha mikro/UMKM yang mendukung penyediaan olahan pangan lokal. Penambahan indikator sub kegiatan tersebut dilakukan sebaagai upaya dukungan perbaikan kualitas konsumsi pangan penduduk. Diagram *fishbone* indikator program DinkopUKM yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 25, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi disajikan pada Lampiran 15.



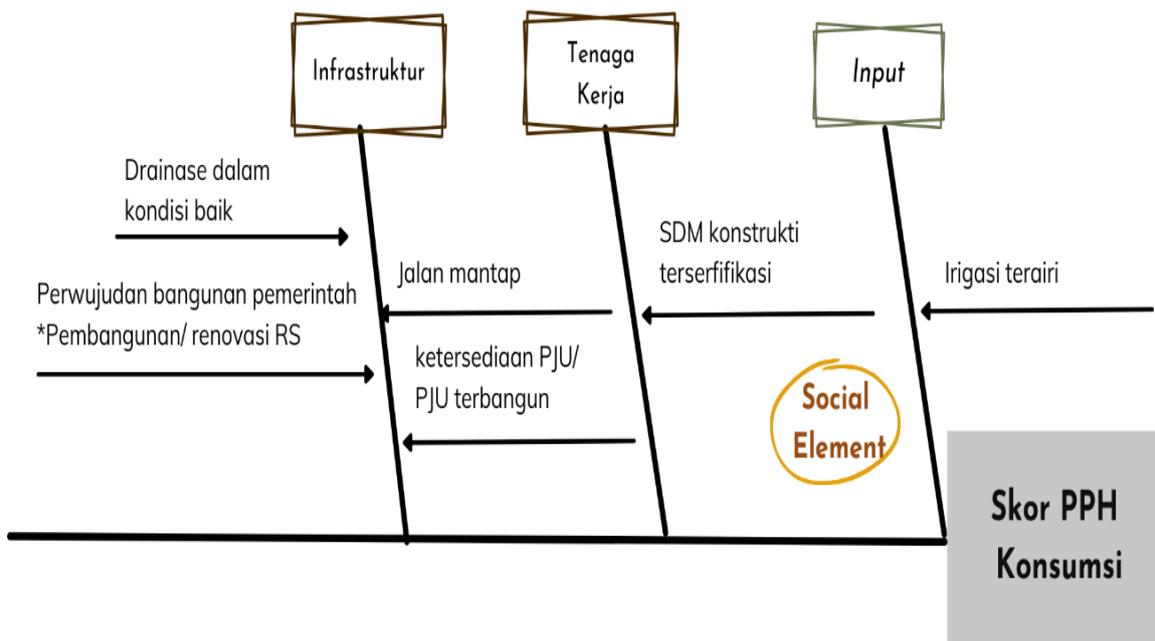
Gambar 25 Indikator program DinkopUKM sesuai sistem pangan



Gambar 26 Indikator program Disperkimtan sesuai sistem pangan

**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** berperan dalam 1) lingkup akses sumber daya alam (elemen sosial); serta 2) lingkup lingkungan/ekosistem

genetik dan tanah (elemen alam) yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan. Indikator program yang termasuk dalam elemen sosial adalah akses aman terhadap air minum, sedangkan indikator program yang termasuk dalam elemen alam meliputi 1) akses aman terhadap sanitasi; 2) bidang tanah pemda yang dimanfaatkan/dikelola. Diagram *fishbone* indikator program Disperkimtan yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 26, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi disajikan pada Lampiran 16.



Gambar 27 Indikator program DPUTR sesuai sistem pangan

**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** berperan dalam lingkup input, tenaga kerja, dan infrastruktur (elemen sosial) yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk. Indikator program yang sesuai dengan elemen sosial meliputi 1) irigasi terairi; 2) SDM konstruksi terfasilitasi; 3) jalan mantap; 4) ketersediaan PJU/PJU terbangun; 5) drainase dalam kondisi baik; 6) perwujudan bangunan pemerintah khususnya kegiatan pembangunan/renovasi rumah sakit. Diagram *fishbone* indikator program DPUTR yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 27, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi disajikan pada Lampiran 17.

**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** (Bappeda) berperan dalam elemen sosial khususnya lingkup peraturan/regulasi. Indikator program yang termasuk dalam lingkup peraturan/regulasi berdasarkan elemen sosial meliputi 1) keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD; 2) keselarasan muatan Renja dengan RKPD; 3) keselarasan muatan RKA dengan RKPD; 4) Perencanaan pembangunan daerah; 5) hasil penelitian/kajian yang diseminasikan; 6) inovasi kreatif di perangkat daerah. Guna mendukung perbaikan konsumsi pangan, Bappeda bertugas sebagai *controlling* dan melakukan evaluasi terhadap setiap indikator-indikator yang telah ditambahkan dalam rangka percepatan perbaikan kualitas konsumsi pangan, termasuk keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD serta muatan Renja dengan RKPD. Diagram *fishbone* indikator program Bappeda yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 28, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi disajikan pada Lampiran 18.



Gambar 28 Indikator program Bappeda sesuai sistem pangan

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Simpulan

Indikator dalam RPJMD berupa indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah (aspek kesejahteraan dan aspek pelayanan umum) secara umum sudah sesuai dengan sistem pangan dalam rangka mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan penduduk. Mayoritas persentase indikator program pada RPJMD terhadap total sistem pangan terletak pada subelemen faktor lain/kesehatan (14,74%) dan ekonomi (13,68%), sedangkan yang terendah adalah subsistem konsumsi, serta sub elemen udara, air dan iklim dengan masing-masing sebesar 1,05%. Mayoritas indikator program pada RPJMD yang sesuai dengan sistem inti terletak pada lingkup produksi (46%), sedangkan sisanya terdapat pada lingkup distribusi (30,77%), agregasi dan proses (15,38%), dan konsumsi (7,69%). Mayoritas indikator program pada elemen sosial terletak pada sub-elemen kesehatan atau faktor lain (19,44%), sedangkan sisanya terletak pada sub-elemen ekonomi (18,05%), pengetahuan (15,27%), peraturan/regulasi (11,11%), norma/sosial (9,72%), input (9,72%), lembaga/organisasi (5,56%), infrastruktur (5,56%), akses SDA (2,78%), dan tenaga kerja (2,78%). Adapun mayoritas indikator program pada elemen alam adalah sub-elemen lingkungan/ekosistem genetik (40%), sisanya sub-elemen tanah (30%), udara (10%), air (10%), dan iklim (10%).

Indikator pada Renstra 17 OPD secara eksplisit juga sudah sesuai dengan sistem pangan, baik sistem inti, elemen sosial, maupun elemen alam. Akan tetapi terdapat beberapa indikator pada Renstra sesuai dinas terkait yang dapat dispesifikkan guna mendukung perbaikan konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bandung.

### 6.2 Saran

Urusan pangan bukan hanya tugas, fungsi dan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan saja, akan tetapi memerlukan dukungan dari seluruh dinas atau 17 OPD terkait. Dukungan lintas OPD dalam bentuk program, kegiatan, maupun subkegiatan untuk perbaikan kualitas konsumsi pangan terletak pada Lampiran 1-18. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan Renja dan anggaran setiap OPD dengan memperhatikan **impact pembangunan pangan** yaitu peningkatan skor PPH konsumsi.

## **BAB VII DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan. 2021. *Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan. 2021. *Renstra Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*
- Food and Agricultural Organization. 2018. *Sustainable Food System; Concept and Framework*.
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga. 2021. *Rencana Strategis Dispora Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. 2021. *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. 2021. *Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2021. *Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Kesehatan. 2021. *Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Lingkungan Hidup. 2021. *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Pertanian. 2021. *Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2016*.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. *Renstra DP2KBP3A Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.
- Dinas Pariwisata dan Budaya. 2021. *Ranwal Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Budaya, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026*.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 2021. *Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kabupaten Bandung tahun 2021-2026.*
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2021. *Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.*
- Dinas Pendidikan. 2021. *Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.*
- Dinas Sosial. 2021. *Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.*
- Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan*
- Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*
- Republik Indonesia. 2012. *Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan*
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia.. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia.*

Republik Indonesia. 2020. *Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah.*

Republik Indonesia. 2020. *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020-2024.*

Republik Indonesia. 2020. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024.*

## BAB VIII LAMPIRAN

Lampiran 1 Kesesuaian indikator RPJMD dengan Sistem Pangan

Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan				
Indikator Makro	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Daerah		Urusan
		Aspek Kesra	Aspek Pelayanan Umum	
Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	*Capaian SPM bidang pendidikan	Pendidikan
*rata-rata lama sekolah		Rata-rata lama sekolah	*APM : PAUD, SD, Pendidikan kesetaraan,	Pendidikan
*Harapan lama sekolah		Harapan lama sekolah	*Indek pemerataan guru dan mapel SD, SMP, UN SMP	Pendidikan
			*Skor pemetaan mutu pendidikan SD, SMP	Pendidikan
			*APK : PAUD, SD, SMP, Kejar paket	Pendidikan
			* %Peserta didik tuntas dalam pembelajaran muatan lokal	Pendidikan
			*% sekolah yang memiliki sanggar bhs sunda	Pendidikan
			*% lembaga PAUD, SD, SMP memiliki ijin operasional	Pendidikan
			% siswa dgn nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Pendidikan
INDEKS KESEHATAN	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan	*Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	Kesehatan
*Angka Harapan Hidup		*Angka harapan hidup	*Persentase tenaga kesehatan yang bermutu	Kesehatan
			*% pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Kesehatan
			*Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO)	Kepemudaan dan Olahraga
			*Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Kepemudaan dan Olahraga

Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan				
Indikator Makro	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Daerah		Urusan
		Aspek Kesra	Aspek Pelayanan Umum	
			*Cakupan pembinaan atlet muda	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>
	*Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		*Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	<b>Kesehatan</b>
			*Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	<b>Kesehatan</b>
<b>Gini ratio</b>	<b>Indeks gini</b>	<b>Gini ratio</b>		
*Indeks pengeluaran	*Indeks pengeluaran	Indeks pengeluaran		
		Pengeluaran perkapita pertahun		
	<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>	<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>	<b>Indeks ketahanan pangan</b>	<b>Pangan</b>
		*Jumlah penduduk miskin	*Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal (%)	<b>Pangan</b>
		*Tingkat kemiskinan	*Persentase ketersediaan pangan utama	<b>Pangan</b>
		*Tingkat pengangguran terbuka	*Persentase penguatan CPPD	<b>Pangan</b>
		*rata-rata lama sekolah	*Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT); Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	<b>Pangan</b>
		*Angka harapan hidup	*Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	<b>Pangan</b>
			*Presentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>

<b>Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan</b>				
<b>Indikator Makro</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>		<b>Urusan</b>
		<b>Aspek Kesra</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
			*Persentase akses aman terhadap air bersih	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>
			*Persentase tenaga kesehatan yang bermutu	<b>Kesehatan</b>
			*% pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	<b>Kesehatan</b>
			*APM : PAUD, SD, Pendidikan kesetaraan,	<b>Pendidikan</b>
			*APK : PAUD, SD, SMP, Kejar paket	<b>Pendidikan</b>
<b>Indeks pembangunan manusia</b>	<b>Indeks pembangunan manusia</b>	<b>Indeks pembangunan manusia</b>		
		*Usia harapan hidup,	Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	<b>Kesehatan</b>
		*harapan lama sekolah,	*APM : PAUD, SD, Pendidikan kesetaraan,	<b>Pendidikan</b>
		*rata-rata lama sekolah,	*APK : PAUD, SD, SMP, Kejar paket	<b>Pendidikan</b>
			Persentase PPKS yang mandiri secara sosial ekonominya	<b>Sosial</b>
			Persentase PPKS yang menerima pelayanan kebutuhan dasar	<b>Sosial</b>
			Persentase PPKS yang berfungsi secara sosial	<b>Sosial</b>
			Porsentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesos	<b>Sosial</b>
			Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani	<b>Sosial</b>
	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>		<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>

<b>Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan</b>				
<b>Indikator Makro</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>		<b>Urusan</b>
		<b>Aspek Kesra</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
			Tingkat keterwujudan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan layak anak	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
			Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
			Persentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
			Persentase data terpilah anak	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
			Persentase Lembaga yang menyediakan pemenuhan hak anak	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
<b>Indeks perkembangan wilayah</b>	<b>Indeks perkembangan wilayah</b>			
		Laju Pertumbuhan Penduduk	*Persentase kemantapan jalan dan kelengkapannya; pada tahun rencana	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>

<b>Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan</b>				
<b>Indikator Makro</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>		<b>Urusan</b>
		<b>Aspek Kesra</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
			*Persentase kondisi jalan kabupaten mantap	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			*Persentase ketersediaan PJU ideal di ruas jalan wilayah administrasi Kabupaten Bandung; Persentase PJU yang terbangun	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			Jumlah ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			Persentase SDM bidang konstruksi terampil yang tersertifikasi	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			*Capaian SPM bidang pendidikan	<b>Pendidikan</b>
			*Indek pemerataan guru dan mapel SD, SMP, UN SMP	<b>Pendidikan</b>
			*Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	<b>Kesehatan</b>
			*Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	<b>Kesehatan</b>
			*Persentase tenaga kesehatan yang bermutu	<b>Kesehatan</b>
			*% pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	<b>Kesehatan</b>
			%sarana distribusi perdagangan yang berkualitas di wilayah	<b>Perdagangan</b>

Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan				
Indikator Makro	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Daerah		Urusan
		Aspek Kesra	Aspek Pelayanan Umum	
PDRB atas dasar harga berlaku/konstan/berlaku perkapita/konstan perkapita		PDRB atas dasar harga berlaku/konstan/berlaku perkapita/konstan perkapita	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Pariwisata
	*Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	*Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	*Persentase sub sektor ekonomi kreatif/ekosistem dan komunitas ekonomi kreatif yang memiliki ekosistem mapan	Pariwisata
	*Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan		*Jumlah Pelaku Ekonomi kreatif	Pariwisata
	*Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan		*Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (nusantara dan mancanegara)	Pariwisata
			*Persentase destinasi wisata yang CHSE dan halal	Pariwisata
			*Jumlah Desa Wisata yang ditata	Pariwisata
			*Jumlah Destinasi Baru	Pariwisata
			Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Pertanian
			*Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Pertanian
			*Jumlah produksi komoditi pertanian (ton)	Pertanian

<b>Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan</b>				
<b>Indikator Makro</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>		<b>Urusan</b>
		<b>Aspek Kesra</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
			*Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) (ton)	<b>Pertanian</b>
			*Jumlah Populasi Ternak (ekor)	<b>Pertanian</b>
			*Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	<b>Pertanian</b>
			*Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju	<b>Pertanian</b>
			*Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	<b>Pertanian</b>
			*Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	<b>Pertanian</b>
			*Persentase penurunan kasus penyakit hewan endemik	<b>Pertanian</b>
			*Persentase status kesehatan hewan ternak	
			*Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	
			*Jumlah lembaga pertanian yang maju (Kelompok Tani)	<b>Pertanian</b>
			*Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	
			*Efektivitas tata kelola pertanahan	<b>Pertanahan</b>
			*Persentase Bidang Tanah Pemda yang dimanfaatkan	<b>Pertanahan</b>
			*Persentase lokasi titik pantau kualitas air	<b>Lingkungan Hidup</b>
			*Persentase lokasi titik pantau kualitas udara	<b>Lingkungan Hidup</b>
			*Penambahan luas tutupan lahan	<b>Lingkungan Hidup</b>

<b>Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan</b>				
<b>Indikator Makro</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>		<b>Urusan</b>
		<b>Aspek Kesra</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
			*Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
			*Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
			*Persentase peningkatan produksi ikan tangkap	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
			*Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
			<b>Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan</b>	<b>Perindustrian</b>
			*Persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas	<b>Perdagangan</b>
			*Nilai Ekspor dan jumlah data IKM UKM potensial atau unggulan	<b>Perdagangan</b>
			*Persentase tefrasilitasnya promosi produk dan pengawasan distribusi	<b>Perdagangan</b>
			*Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	<b>Perdagangan</b>
			*Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	<b>Perdagangan</b>
			*Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	<b>Perdagangan</b>
			*Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	<b>Perdagangan</b>
			*Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	<b>Perdagangan</b>
			*Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	<b>Perdagangan</b>
			*Persentase sentra industri yang sudah tertata	<b>Perindustrian</b>

<b>Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan</b>				
<b>Indikator Makro</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>		<b>Urusan</b>
		<b>Aspek Kesra</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
			*Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	<b>Perindustrian</b>
			*Persentase kepatuhan industri	<b>Perindustrian</b>
			*Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	<b>Perindustrian</b>
			*Persentase industri yang terdata dalam SIINAS	<b>Perindustrian</b>
			*Persentase pelaporan SIINAS	<b>Perindustrian</b>
			*Persentase koperasi yang berkualitas	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*Laju pertumbuhan usaha mikro	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*Persentase koperasi sehat	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*Persentase Koperasi Patuh	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*persentase Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*Persentase Kapasitas Usaha Mikro	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*persentase usaha mikro yang meningkat kualitasnya	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*Persentase Kualitas usaha mikro	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*Terbangunnya Sistem Manajemen Data dan Informasi Usaha Mikro terintegrasi berbasis digital	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*Persentase Koperasi aktif	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*Persentase Koperasi yang berizin	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>

Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan				
Indikator Makro	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Daerah		Urusan
		Aspek Kesra	Aspek Pelayanan Umum	
			*Persentase SDM koperasi yang kompeten	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			*Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Indeks kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Lingkungan hidup
			*Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	Lingkungan hidup
			*Persentase jaringan drainase perkotaan dalam kondisi baik	Pekerjaan umum dan penataan ruang
			*Persentase saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Pekerjaan umum dan penataan ruang
	*kualitas tutupan hutan		*Persentase panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	Pekerjaan umum dan penataan ruang
			*Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
			*Persentase akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
			*Persentase akses aman terhadap sanitasi di kawasan permukiman	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
			*Persentase pengurangan dan penanganan sampah	Lingkungan hidup
			*Persentase lokasi titik pantau kualitas air	Lingkungan Hidup
			*Persentase lokasi titik pantau kualitas udara	Lingkungan Hidup
			*Penambahan luas tutupan lahan	Pertanahan
			*Persentase Pengurangan & penanganan sampah	Lingkungan Hidup

Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan				
Indikator Makro	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Daerah		Urusan
		Aspek Kesra	Aspek Pelayanan Umum	
			*Persentase Kampung Bedas	Lingkungan hidup
			*Persentase Desa/Kel yang berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengawasan sosial)	Lingkungan hidup
Laju pertumbuhan penduduk		Laju pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Total fertility rate		*Capaian Angka Total Fertility Rate	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			*Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			*Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			*Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			*Partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan/pemberdayaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			*Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			*Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			*Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<b>Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan</b>				
<b>Indikator Makro</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>		<b>Urusan</b>
		<b>Aspek Kesra</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
			*Cakupan kepemilikan KIA	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
			*Persentase Validitas Data Kependudukan	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
	<b>Indeks kualitas infrastruktur</b>		Persentase kemandapan jalan dan kelengkapannya	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			Perwujudan Rencana Tata Ruang	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			Persentase saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			Prosentase SDM Konstruksi yang tersertifikasi	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju	<b>Pertanian</b>
	<b>Indeks desa membangun</b>		<b>Indeks Desa Membangun</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
			*Persentase Desa Mandiri	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
			*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Yang Aktif	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
			*Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
	<b>Indeks risiko bencana</b>		*Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>

Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan				
Indikator Makro	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Daerah		Urusan
		Aspek Kesra	Aspek Pelayanan Umum	
			*Persentase peningkatan pelayanan kepada warga/masyarakat yang terkena dampak bencana	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>
<b>Indeks pengeluaran</b>	<b>Indeks pengeluaran</b>	<b>Indeks pengeluaran</b>		
Pengeluaran Per Kapita		Pengeluaran Per Kapita pertahun		
<b>Tingkat pengangguran terbuka</b>	<b>Tingkat pengangguran terbuka</b>	<b>Tingkat pengangguran terbuka</b>	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	<b>Tenaga kerja</b>
			Persentase Tenaga kerja Pemula yang Tersertifikasi	<b>Tenaga kerja</b>
	<b>Indeks perencanaan pembangunan daerah</b>			
		Laju pertumbuhan penduduk	*Total Fertility Rate	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>
			*Persentase bangunan pemerintah yang terbangun pada tahun rencana	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			*Efektivitas tata kelola pertanahan	<b>Pertanahan</b>
			*Persentase Bidang Tanah Pemda yang dimanfaatkan	<b>Pertanahan</b>
			*Persentase lembaga PAUD, SD dan SMP swasta yang mempunyai ijin operasional	<b>Pendidikan</b>
			*Laju pertumbuhan usaha mikro	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
			*Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	<b>Pertanian</b>

<b>Indikator RPJMD sesuai Sistem Pangan</b>				
<b>Indikator Makro</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>		<b>Urusan</b>
		<b>Aspek Kesra</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
			*Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju	<b>Pertanian</b>
			*Persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas dan sesuai standar di wilayah	<b>Perdagangan</b>
			Persentase OPD dan unit perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet	Komunikasi dan Informatika
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	Komunikasi dan Informatika
			Indeks persepsi publik terhadap penyediaan informasi pemerintah daerah	Komunikasi dan Informatika
			Indeks Perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
			Persentase keselarasan perencanaan dengan penganggaran	Bappeda
			Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	Bappeda
			Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD	Bappeda
			Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, pencapaian dalam dokumen perencanaan	Bappeda

Lampiran 2 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK_Renstra Dispakan	Keterangan	OPD
*Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal (%)	Indikator sasaran; indikator program	Dispakan
*Jumlah kajian pola dan kebutuhan konsumsi pangan tersedia tepat waktu	Indikator kegiatan	Dispakan
*Jumlah kelompok pekarangan pangan lestari (P2L)	Indikator kegiatan	Dispakan
*Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal	Indikator kegiatan	Dispakan
*Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun yang dilaksanakan	Indikator kegiatan	Dispakan
Persentase ketersediaan pangan utama (umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, buah)	Indikator program	Dispakan
*Persentase simpul pangan di desa yang aktif	Indikator kegiatan	Dispakan
**Jumlah fasilitasi Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (umbi-umbian/pangan segar)	Indikator sub kegiatan	Dispakan & DinkopUKM
**Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan yang dilaksanakan	Indikator sub kegiatan	Dispakan
**Jumlah laporan rekomendasi bulanan pasokan dan harga pangan (pangan segar)	Indikator sub kegiatan	Dispakan & Disperindag
**Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat terfasilitasi	Indikator sub kegiatan	Dispakan
**Jumlah TTI yang terfasilitasi	Indikator sub kegiatan	Dispakan
<b>Persentase penguatan CPPD</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Dispakan</b>
Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	Indikator program	Dispakan
*Jumlah lumbung pangan yang beroperasi baik	Indikator kegiatan	Dispakan
**Jumlah lumbung pangan terfasilitasi	Indikator sub kegiatan	Dispakan
<b>Persentase penguatan CPPD</b>	<b>indikator sasaran; indikator kegiatan</b>	<b>Dispakan</b>
**Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pengendalian cadangan pangan yang dilaksanakan	Indikator sub kegiatan	Dispakan
**Jumlah kajian ketersediaan pangan tersedia tepat waktu	Indikator sub kegiatan	Dispakan
**Jumlah CPPD beras tersedia; komoditas lain tersedia (umbi-umbian/kacang-kacangan/sayur./buah)	Indikator sub kegiatan	Dispakan
<b>Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Dispakan</b>
Persentase Tingkat keamanan pangan	Indikator program	Dispakan
*Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif)	Indikator kegiatan	Dispakan
**Jumlah orang/poktan yang dilatih	Indikator sub kegiatan	Dispakan
**Jumlah PSAT yang diuji mutu dan keamanan pangan	Indikator sub kegiatan	Dispakan

<b>Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan</b>		
<b>IK Renstra Dispakan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>OPD</b>
Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	Indikator program	<b>Dispakan</b>
<b>Persentase desa rentan rawan pangan yang diintervensi</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Dispakan</b>
Persentase desa rentan rawan pangan yang tertangani	Indikator program	<b>Dispakan</b>
*Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Indikator kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah pemutakhiran laporan SKPG-FSVA tersedia tepat waktu	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
*Persentase KK miskin yang tertangani	Indikator kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan yang dilaksanakan	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah KK miskin yang terintervensi	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah balita stunting yang terintervensi	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
<b>NILAI TUKAR PELAKU USAHA PERIKANAN</b>		
<b>Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Dispakan</b>
	<b>Indikator sasaran;</b> Indikator program	<b>Dispakan</b>
*Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif)	Indikator kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah rekomendasi Nomor Izin Berusaha (NIB) perikanan	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
*Cakupan bina kelompok perikanan	Indikator kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah fasilitasi yang diberikan bagi pembudidaya ikan kecil	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah fasilitasi kelembagaan untuk pembudidaya kecil	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah pelaku usaha perikanan mendapat sosialisasi akses bantuan pembiayaan	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah pelaku usaha perikanan terlatih akses TIK	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
*Jumlah produksi ikan budidaya	Indikator kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah laporan statistik perikanan yang dikeluarkan tepat waktu	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah bantuan prasarana pemudidayaan ikan	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah induk ikan unggul tersedia; Jumlah produksi benih	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah laporan monitoring kesehatan ikan yang diselesaikan tepat waktu	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi penerapan CPIB, CBIB	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah dokumen Perencanaan, Dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat tersedia	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
<b>Persentase peningkatan produksi ikan tangkap</b>	<b>Indikator sasaran;</b> Indikator program	<b>Dispakan</b>
*Persentase perairan umum yang ditebar ikan	Indikator kegiatan	<b>Dispakan</b>

<b>Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan</b>		
<b>IK Renstra Dispakan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>OPD</b>
**Jumlah lokasi penebaran ikan (restocking ikan)	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
<b>Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan</b>	<b>Indikator sasaran;</b> Indikator program	<b>Dispakan</b>
*Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan	Indikator kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah data dan informasi pengolahan yang dikeluarkan tepat waktu	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
*Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP	Indikator kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah yang dilatih Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dan diversifikasi nilai tambah pengolahan ikan	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
*Produksi hasil olahan perikanan	Indikator kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah kampanye/promosi/kampanye produk perikanan	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>
**Jumlah fasilitasi yang diberikan bagi pelaku usaha pengolahan ikan	Indikator sub kegiatan	<b>Dispakan</b>

Keterangan : Rekomendasi terletak pada tulisan dengan font berwarna merah

Lampiran 3 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pertanian

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Distan	Keterangan	OPD
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	Indikator tujuan	Dinas Pertanian
Jumlah produksi komoditi pertanian (ton)	Indikator sasaran	Dinas Pertanian
Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) (ton)	Indikator program	Dinas Pertanian
Jumlah Populasi Ternak (ekor)	Indikator program	Dinas Pertanian
*Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah embung yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah DAM Parit yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah pintu air yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah RPH yang terbangun, terhabilitasi dan terpelihara	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun/direhabilitas/dipel ihara (puskeswan, pasar hewan, kandang komunal, sumur dangkal, sumur dalam, dll) (unit)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah balai penyuluh di kecamatan yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
Jumlah pengembangan sarana prasarana dalam cluster peternakan	Indikator Program	Dinas Pertanian
*Fasilitasi sarana/Prasarana Kandang Ternak	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
*Jumlah kelompok tani ternak yang mengembangkan potensi hasil peternakan wilayahnya	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
*Jumlah Kelompok ternak yang menerapkan konsep budidaya ramah lingkungan	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan (Ha)	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah pengembangan kawasan hortikultura dan konservasi lahan	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah varietas hortikultura yang teridentifikasi sebagai varietas unggul lokal Kabupaten Bandung	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah luas lahan intensifikasi tanaman pertanian (ha)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah luas lahan pengembangan komoditi tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/komoditi pertanian unggulan/pengembangan tanaman pangan (Ha)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju	Indikator program	Dinas Pertanian
*Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
*Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
*Jumlah luas wilayah LP2B yang dipetakan	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah buku data pokok pertanian	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah jenis informasi pengelolaan LP2B	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Luas lahan LP2B yang dikelola (ha)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang disusun	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian

<b>Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan</b>		
<b>IK Renstra Distan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>OPD</b>
**Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah kajian pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian/sarana budidaya pertanian	Indikator program	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah kelompok tani yang dibina dan dimonitor dalam penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Kelompok).	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Fasilitasi sarana Benih, Pengolahan Tanah, dan Pompa (Paket)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah implementasi teknologi sarana pertanian (Kegiatan)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
** Jumlah sarana pertanian yang terpelihara dan dapat digunakan	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya dalam penggunaan sarana pendukung pertanian	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah kelompok tani yang di fasilitasi Sarana Produksi Pertanian, Alsintan Pra Panen, Alsintan Pasca Panen, dan alsintan pengolahan (Kelompok Tani)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah fasilitasi sarana pendukung pertanian yang disediakan	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah Kelompok Tani Akabi dibina dalam penggunaan sarana (alsintan) budidaya	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah Kelompok Tani Akabi yang mengolah produk bernilai tambah	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah Pengembangan budidaya Akabi	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah Kelompok Penangkar Benih yang dibina (Kelompok)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah Eksplorasi/sertifikasi komoditas unggulan pertanian yang dilaksanakan (Kegiatan)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Diseminasi Komoditi khas Kabupaten (Komoditi)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah sarana/prasarana produksi sayuran eksklusif dan tanaman hias	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Fasilitasi Bibit dan Pengolah Lahan	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang dihasilkan oleh UPTD Pembibitan	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah komoditi unggulan pertanian yang dilestarikan dan dikembangkan di UPTD Pembibitan	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah implementasi teknologi pertanian yang terstandarisasi (kelompok)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah Demplot/Demarea/Demfarm Pertanian Unggulan (lokasi)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah luas lahan intensifikasi tanaman pertanian (ha)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah benih padi lokal berlabel dihasilkan bagi masyarakat	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah penerapan teknologi pertanian yang dikembangkan	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Fasilitasi sarana benih, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (kelompok tani)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Indikator program	<b>Dinas Pertanian</b>

<b>Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan</b>		
<b>IK Renstra Distan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>OPD</b>
Jumlah populasi Ternak dan Unggas	Indikator program	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah benih/bibit ternak unggul yang dihasilkan di UPTD	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*. Jumlah Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) yang dikeluarkan	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah benih/bibit ternak yang terfasilitasi recording ternak (ekor)	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah laporan monitoring ketersediaan benih/bibit ternak (laporan)	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pembinaan sertifikasi (kelompok)	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah bibit ternak unggul hasil seleksi	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah kelompok yang dibina dalam penyediaan Hijauan Pakan Ternak (kelompok)	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah peternak pembibit yang mampu menerapkan pembibitan ternak yang baik (orang)	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah Sapi Potong/Perah yang di Inseminasi Buatan (ekor)	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Fasilitasi sarana Kandang dan pengolahan limbah Ternak	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah Kelompok ternak yang difasilitasi pasca panen dan pengolahan peternakan	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Fasilitasi Bibit Ternak pada kelompok tani (kelompok)	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
* Jumlah peternak yang mampu menerapkan teknis budidaya ternak yang baik (orang)	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	Indikator program	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Fasilitasi sarana pengendalian OPT	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan pengendalian OPT pertanian dengan baik (kelompok)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah petani yang mampu menerapkan Pengendalian Hama (orang)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah fasilitasi, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	Indikator program	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah pelaku usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah fasilitasi penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
		<b>Dinas Pertanian</b>
Persentase status kesehatan hewan ternak	Indikator program	<b>Dinas Pertanian</b>
Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	Indikator program	<b>Dinas Pertanian</b>
*Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani (satuan PHMS)	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
*Persentase status kesehatan hewan	Indikator kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah Hewan yang divaksin (ekor)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>
**Jumlah Surveillance penyakit hewan menular strategis dilaksanakan (ekor)	Indikator sub kegiatan	<b>Dinas Pertanian</b>

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Distan	Keterangan	OPD
**Jumlah Pengujian obat hewan (jenis)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah monitoring pemakaian obat hewan sesuai ketentuan (Lokasi)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah hewan yang tertangani kesehatannya	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Fasilitasi Surveillance untuk kompartemen yang terkendali PHMS (lokasi)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Fasilitasi Obat Cacing Ruminansia Kecil dan Besar (Paket)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah Kelompok terdampak kasus yang difasilitasi (Kelompok)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah promosi kesehatan hewan untuk mengurangi dampak wabah penyakit hewan menular (kali)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
*Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah lahan pasar hewan (lokasi)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah pelayanan penjualan ternak di pasar hewan (ekor)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah sarana yang menunjang operasional Pasar Hewan (jenis)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah ternak kurban yang terawasi status kesehatannya (ekor)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
*Jumlah wilayah pelayanan Puskesmas dilayani	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah sampel teruji dalam laboratorium kesehatan hewan (sampel)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah hewan/ternak yang terlayani kesehatan hewan oleh UPT Puskesmas dan Lab (ekor)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
*Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah ternak yang dipotong di UPTD RPH dalam pemenuhan produk hewan yang HAUS	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
** Jumlah produk hewan yang diperiksa	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah ternak ruminansia betina produktif dikendalikan di RPH/tahun (ekor)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah penerapan persyaratan Teknis Kesmavet di masyarakat	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah sampel hasil produk ternak yang diuji tingkat Halal Aman Utuh dan Sehat	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	Indikator program	Dinas Pertanian
* Cakupan penyuluhan pertanian (+pengendalian <i>food loss/ pasca panen pangan pokok, sayur, dan buah</i> )	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
*Jumlah dokumen standar penyuluhan pertanian berbasis digital	Indikator kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah jenis kegiatan kepenyuluhan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat diikuti/dilaksanakan (kali)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah Penyuluh ASN dan Non-ASN yang meningkat pengetahuan teknis (orang)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
**Jumlah penyuluh pertanian yang dipenuhi kebutuhan administrasi dan operasional penyuluhan (orang)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
*Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan pertanian tersedia (jenis)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
*Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi sarana dan prasarana dalam pengembangan usaha (unit)	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian
*Jumlah pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang/Bimbingan Teknis Kelompok Tani	Indikator sub kegiatan	Dinas Pertanian

Lampiran 4 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK_Renstra Indag	Keterangan	OPD
Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	Indikator Program	Disperindag
*Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	Indikator kegiatan	Disperindag
**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan sarana, prasarana dan pengelolaannya	Indikator sub kegiatan	Disperindag
**Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distirbusi perdagangan	Indikator sub kegiatan	Disperindag
Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	Indikator Program	Disperindag
*Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan	Indikator kegiatan	Disperindag
Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan	Indikator program	Disperindag
*Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang terbina	Indikator kegiatan	Disperindag
*Jumlah pelaku ekspor yang ditingkatkan citra produk ekspornya	Indikator kegiatan	Disperindag
Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung	Indikator program	Disperindag
*Jumlah kegiatan pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Indikator kegiatan	Disperindag
*Jumlah kegiatan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Indikator kegiatan	Disperindag
Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	Indikator program	Disperindag
*Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan sarana, prasarana dan pengelolaannya	Indikator kegiatan	Disperindag
*Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distirbusi perdagangan	Indikator kegiatan	Disperindag
Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	Indikator program	Disperindag
*Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan	Indikator kegiatan	Disperindag
Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	Indikator program	Disperindag
*Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin	Indikator kegiatan	Disperindag
*Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Kemudahan Pengembangan Usaha (Perizinan) Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi TDG, STPW, dan kemitraan dengan toko modern	Indikator kegiatan	Disperindag

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Indag	Keterangan	OPD
Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	Indikator program	Disperindag
**Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	Indikator kegiatan	Disperindag
**Jumlah perusahaan yang terfasilitasi perizinan IUI secara elektronik	Indikator kegiatan	Disperindag
Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting (beras, hewani, kacang, minyak, gula)	Indikator program	Disperindag
*Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (beras, hewani, kacang, minyak, gula)	Indikator kegiatan	Disperindag
**Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka ketersediaan BA/aksesibilitas POKTING (beras, hewani, kacang, minyak, gula) di tingkat agen dan pasar rakyat selama 1 tahun	Indikator sub kegiatan	Disperindag
**Jumlah pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat dalam 1 tahun	Indikator sub kegiatan	Disperindag
*Persentase harga dan stok BAPOKTING (beras, hewani, kacang, minyak, gula) di tingkat pasar kabupaten/kota	Indikator kegiatan	Disperindag
**pelaksanaan pemantauan harga dan stok BAPOKTING (beras, hewani, kacang, minyak, gula) pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Indikator sub kegiatan	Disperindag
**Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus	Indikator sub kegiatan	Disperindag
Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer	Indikator program	Disperindag
*Jumlah pengawasan pengadaan/penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	Indikator kegiatan	Disperindag
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Non Migas	Indikator program	Disperindag
*Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan	Indikator kegiatan	Disperindag
*Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang terbina	Indikator kegiatan	Disperindag
*Jumlah misi dagang yang diikuti oleh produk ekspor unggulan	Indikator kegiatan	Disperindag
*Jumlah pelaku ekspor yang ditingkatkan citra produk ekspornya	Indikator kegiatan	Disperindag
Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	Indikator program	Disperindag
*Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung	Indikator kegiatan	Disperindag
**Jumlah kegiatan pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Indikator sub kegiatan	Disperindag
**kegiatan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Indikator sub kegiatan	Disperindag

<b>Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan</b>		
<b>IK Renstra Indag</b>	<b>Keterangan</b>	<b>OPD</b>
Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	Indikator program	Disperindag
Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	Indikator program	Disperindag
*Jumlah dokumen rencana pembangunan industri (Roadmap pembangunan industri Kabupaten Bandung)	Indikator kegiatan	Disperindag
*Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Indikator kegiatan	Disperindag
*Jumlah IKM yang terfasilitasi usahanya	Indikator kegiatan	Disperindag
*Jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Indikator kegiatan	Disperindag

Lampiran 5 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Kesehatan

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Dinkes	Keterangan	OPD
Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	Indikator program	Dinas Kesehatan
*Persentase posyandu aktif	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
**Jumlah Informasi (konten)Promosi Kesehatan	Indikator sub kegiatan	Dinas Kesehatan
<b>** (isi piringku) / menurut siklus hidup</b>		
**Jumlah Rumah Tangga (RT) yang ber PHBS	Indikator sub kegiatan	Dinas Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang bermutu	Indikator program	Dinas Kesehatan
*Persentase/jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP	Indikator kegiatan; sub kegiatan	Dinas Kesehatan
*Persentase puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai jenis yang dipersyaratkan	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
**Puskesmas Yang Memiliki Jenis Tenaga kesehatan Sesuai Standar dan kompetensi (termasuk ahli gizi) *Persentase ahli gizi terhadap total nakes	Indikator sub kegiatan	Dinas Kesehatan
Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di Puskesmas	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
*Jumlah tenaga Kesehatan yang mengikuti Pelatihan peningkatan Kompetensi	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	Indikator program	Dinas Kesehatan
*Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
**Jumlah Pembangunan Puskesmas/Poskesdes/Pustu	Indikator sub kegiatan	Dinas Kesehatan
**Jumlah pengadaan dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Indikator sub kegiatan	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Mesdik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
*Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Indikator sub kegiatan	Dinas Kesehatan
*Jumlah Pengadaan Obat dan Vaksin bermutu sesuai Standar	Indikator sub kegiatan	Dinas Kesehatan
Persentase seorang yang dibayarkan premi kesehatan bagi masyarakat miskin	Indikator program	Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan balita yang mengalami masalah gizi dan mendapatkan penanganan sesuai standar	Indikator program	Dinas Kesehatan
Persentase RW yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Indikator program	Dinas Kesehatan
*Jumlah RW yang melaksanakan STBM		Dinas Kesehatan
*Jumlah Ibu Hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil/ibu bersalin	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
<b>*Persentase bumil anemia dan bumil anemia yang mendapatkan pelayanan kesehatan</b>	indikator sub kegiatan	
*Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
*Jumlah balita mendapat pelayanan kesehatan balita	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
*Jumlah siswa SD mendapat imunisasi	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan
*Jumlah orang usia 15-59 tahun/60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Indikator kegiatan	Dinas Kesehatan

<b>Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan</b>		
<b>IK_Renstra Dinkes</b>	<b>Keterangan</b>	<b>OPD</b>
*Jumlah penderita Hipertensi/DM/TBC/HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>
*Jumlah kejadian KLB/krisis kesehatan akibat bencana dengan penduduk terdampak yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>
*Jumlah pelayanan Balita yang mengalami masalah gizi dan mendapatkan penanganan sesuai standar	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>
*Persentase pelayanan diare sesuai standar	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>
*Jumlah kunjungan masyarakat ke fasyankes	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>
*Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama 9FKTP) yang terakreditasi dengan strata	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>
Persentase dokumen sistem informasi kesehatan yang dibuat berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan	Indikator program	<b>Dinas Kesehatan</b>
*Jumlah dokumen sistem informasi kesehatan yang dibuat berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan (Profil kesehatan, Buku saku, informasi publik)	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>
Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	Indikator program	<b>Dinas Kesehatan</b>
*Jumlah RS yang visitasi/dibina/sesuai standar	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>
*Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan BOK	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>
		<b>Dinas Kesehatan</b>
Persentase Produk Olahan Makanan dan Minuman yang telah tersertifikasi layak edar memenuhi syarat	Indikator Program	<b>Dinas Kesehatan</b>
*Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>
Persentase hasil pemeriksaan tindak lanjut post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Indikator Program	<b>Dinas Kesehatan</b>
*Persentase Pangan IRT yang memenuhi syarat	Indikator kegiatan	<b>Dinas Kesehatan</b>

Lampiran 6 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Sosial

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Dinsos	Keterangan	OPD
Persentase KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Indikator program	Dinsos
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan psikososial Korban Bencana Alam (KBA)/Korban Bencana Sosial (KBS)	Indikator kegiatan	Dinsos
*Jumlah jiwa korban bencana yang memperoleh bantuan permakanaan per 7 hari	Indikator sub kegiatan	Dinsos
*Jumlah jiwa korban bencana yang memperoleh bantuan permakanaan sesuai prinsip gizi seimbang (khususnya menyediakan sayur & buah)- korban terdampak pandemi	Indikator sub kegiatan	Dinsos
*Jumlah permakanaan khusus bagi kelompok rentan	Indikator sub kegiatan	Dinsos
*Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Indikator sub kegiatan	Dinsos
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan psikososial Korban Bencana Alam (KBA)/Korban Bencana Sosial (KBS) Tagana yang terlatih	Indikator kegiatan	Dinsos
*Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	Indikator sub kegiatan	Dinsos
Jumlah tagana yang tersedia	Indikator sub kegiatan	Dinsos
Persentase PPKS yang meningkat keberfungsian sosialnya	Indikator program	Dinsos
*Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	Indikator kegiatan	Dinsos
**Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Terlantar yang mendapat permakanaan	Indikator sub kegiatan	Dinsos
**Jumlah PPKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, dan spiritual	Indikator sub kegiatan	Dinsos
*Jumlah PPKS terlantar yang mendapat akses pendidikan dan kesehatan dasar	Indikator sub kegiatan	Dinsos
Persentase keluarga miskin (FKM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi	Indikator program	Dinsos
*Persentase keluarga miskin (FKM) yang tertangani	Indikator program	Dinsos
*Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diverifikasi	Indikator sub kegiatan	Dinsos
*Jumlah fakir miskin yang terdata cakupan kabupaten/Kota	Indikator sub kegiatan	Dinsos
Jumlah keluarga/individu yang mendapat fasilitasi bantuan sosial	Indikator sub kegiatan	Dinsos

Lampiran 7 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Dispora	Keterangan	OPD
Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO)	Indikator program	Dispora
Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Indikator program	Dispora
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Indikator program	Dispora
*Jumlah organisasi kepemudaan pelopor pangan lokal	Indikator sub kegiatan	Dispora
*Fasilitasi organisasi kepemudaan pelopor pangan lokal	Indikator sub kegiatan	Dispora
Jumlah pembinaan atlet berprestasi	Indikator program	Dispora
Persentase atlet yang diberikan pelayanan gizi olahraga	Indikator kegiatan	Dispora
Persentase cabang olahraga yang memiliki ahli gizi	Indikator sub kegiatan	Dispora

Lampiran 8 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Diskominfo	Keterangan	OPD
Jaringan Internet kabupaten; wilayah	Indikator program	Diskominfo
Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik dari media massa dan media sosial	Indikator sub kegiatan	Diskominfo
Jumlah aktivitas penyelenggaraan konten agenda prioritas pemerintah daerah dan pusat melalui media diseminasi informasi (*konten pangan, gizi dan kesehatan dari dinas terkait)	Indikator sub kegiatan	Diskominfo, Dinkes, Dispakan
Jumlah PD yang menyusun daftar informasi publik (*konten pangan, gizi dan kesehatan dari dinas terkait)	Indikator sub kegiatan	Diskominfo, Dispakan, Dinkes,
Jumlah fasilitasi penguatan SDM	Indikator sub kegiatan	Diskominfo
Jumlah diseminasi informasi/forum komunikasi informasi (*konten pangan, gizi dan kesehatan dari dinas terkait)	Indikator sub kegiatan	Diskominfo, Dispakan, Dinkes
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Indikator program	Diskominfo
Jumlah kelembagaan masyarakat yang menyediakan layanan konsultasi terkait B2SA	Indikator kegiatan	Diskominfo, Dispakan, Dinkes, Disperindag
Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan secara online dan terintegrasi	Indikator program	Diskominfo
Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Indikator kegiatan	Diskominfo
Jumlah dokumen /regulasi kebijakan TIK yang tersusun	Indikator sub kegiatan	Diskominfo
Jumlah jenis kelengkapan data center	Indikator sub kegiatan	Diskominfo
Jumlah aplikasi layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi	Indikator sub kegiatan	Diskominfo
Jumlah database aplikasi dan websiter terpelihara	Indikator sub kegiatan	Diskominfo

Lampiran 9 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Badan Pusat Statistik

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra BPS	Keterangan	OPD
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Indikator program	BPS
*Jumlah publikasi laporan neraca pengeluaran yang terbit tepat waktu	Indikator kegiatan	BPS
*Jumlah publikasi/laporan neraca produksi yang terbit tepat waktu	Indikator kegiatan	BPS
Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu ( % )	Indikator kegiatan	BPS
*Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu	Indikator kegiatan	BPS
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	Indikator kegiatan	BPS
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	Indikator kegiatan	BPS
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	Indikator kegiatan	BPS
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	Indikator kegiatan	BPS
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	Indikator kegiatan	BPS
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	Indikator kegiatan	BPS
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan yang terbit tepat waktu	Indikator kegiatan	BPS

Lampiran 10 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Lingkungan Hidup

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK_Renstra DLH	Keterangan	OPD
Indeks lingkungan hidup	Indikator tujuan	DLH
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	Indikator sasaran	DLH
Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	Indikator program	DLH
*Persentase Capaian Kegiatan terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang dilaksanakan	Indikator kegiatan	DLH
**Jumlah kegiatan Pendahuluan Penyusunan RPPLH	Indikator sub kegiatan	DLH
**Jumlah kajian Lingkungan	Indikator sub kegiatan	DLH
Persentase Volume Sampah yang terkelola	Indikator program	DLH
*Persentase Penanganan dan Pengurangan Volume Sampah	Indikator kegiatan	DLH & Distan
**Jumlah sampah yang didaur ulang dan dimanfaatkan kembali	Indikator sub kegiatan	DLH
**Jumlah tonase pengangkutan sampah per Tahun dari operasional UPTD	Indikator sub kegiatan	DLH
**Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait pengelolaan persampahan	Indikator sub kegiatan	DLH
**Jumlah sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat untuk pengurangan sampah	Indikator sub kegiatan	DLH
*Jumlah Tonase sampah yang terkelola	Indikator program; Indikator kegiatan	DLH
**Jumlah Pembangunan TPS 3R	Indikator sub kegiatan	DLH
Persentase lokasi titik pantau kualitas air	Indikator program	DLH
*Jumlah lokasi titik pantau kualitas air	Indikator kegiatan	DLH
**Tersedianya data kualitas air	Indikator kegiatan	DLH
**Jumlah demplot infrastruktur pengolahan air limbah	Indikator sub kegiatan	DLH
Persentase lokasi titik pantau kualitas udara	Indikator program	DLH
*Jumlah lokasi titik pantau kualitas udara	Indikator kegiatan	DLH
**Tersedianya data kualitas udara	Indikator sub kegiatan	DLH
**Jumlah bimtek pengendalian Perubahan Iklim	Indikator sub kegiatan	DLH
**Jumlah sosialisasi Bimtek Sosialisasi KSDA	Indikator sub kegiatan	DLH
*Jumlah lokasi pencemaran yang ditanggulangi	Indikator kegiatan	DLH
**Jumlah Industri yang menerapkan produksi bersih	Indikator sub kegiatan	DLH
Persentase Kampung Bedas	Indikator program	DLH
*Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	Indikator kegiatan	DLH
**Jumlah Sosialisasi/bimtek sekolah adiwiyata	Indikator sub kegiatan	DLH
**Jumlah dukungan lintas sektor	Indikator sub kegiatan	DLH
Persentase Desa/Kel yang berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengawasan sosial)	Indikator program	DLH
*Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega)	Indikator kegiatan	DLH
**Jumlah edukasi lingkungan	Indikator sub kegiatan	DLH

<b>Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan</b>		
<b>IK_Renstra DLH</b>	<b>Keterangan</b>	<b>OPD</b>
**Jumlah titik pemantauan dan/atau pengawasan sosial	Indikator sub kegiatan	DLH
**Jumlah Sosialisasi Pengendalian Pencemaran lingkungan	Indikator sub kegiatan	DLH
Penambahan luas tutupan lahan	Indikator program	DLH

Lampiran 11 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK_Renstra DPMD	Keterangan	OPD
Persentase Desa Mandiri	Indikator sasaran	DPMD
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	Indikator program	DPMD
*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	Indikator kegiatan	DPMD
*Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Indikator sub kegiatan	DPMD
*Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu (alat peraga/ media penyuluhan dan edukasi gizi sesuai siklus hidup), LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Indikator sub kegiatan	DPMD
Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	Indikator program	DPMD
* Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Indikator kegiatan	DPMD
*Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Indikator sub kegiatan	DPMD

Lampiran 12 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra DP2KBP3A	Keterangan	OPD
TFR (angka kelahiran total)	Indikator program	DP2KBP3A
Capaian Angka Total Fertility Rate	Indikator sasaran	DP2KBP3A
Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru	Indikator program	DP2KBP3A
*Jumlah peserta KB baru- Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Frekuensi terlaksananya jenis Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui moment strategis	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah kebijakan terkait sarana promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah kegiatan Mekanisme Operasional program KKBPK (rapat koordinasi)	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Paguyuban yang berperan dalam Program KKBPK	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) yang dibina	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
*jumlah IMP yang dibina	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
*Jumlah Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
*Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Faskes yang memperoleh sarana peunjang pelayanan KB	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meningkat	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
Partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Indikator sasaran	DP2KBP3A
Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Indikator program	DP2KBP3A

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra DP2KBP3A	Keterangan	OPD
persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga	Indikator program	DP2KBP3A
*Jumlah kelompok pengelola/pelaksana bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendampingan tentang bina keluarga	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
*Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat promosi dan sosialisasi tentang orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga (+ perbaikan konsumsi pangan/ diet sesuai siklus hidup/ B2SA)	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
*Jumlah sosialisasi IPK yang dilaksanakan	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan	Indikator program	DP2KBP3A
*Presentase lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif menangani permasalahan gender	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah dokumen kebijakan dalam pelaksanaan PUG	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah peserta yang mengikuti bimtek PPRG	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
*persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang memberikan advokasi terhadap Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
*Persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan serta dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Kegiatan Yang berintegrasi di Kampung KB (edukasi gizi seimbang, PHBS, promkes)	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah pelaksanaan pembinaan terpadu Kampung KB Kabupaten Bandung	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga	Indikator program	DP2KBP3A
*Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah terbentuknya Desa P2WKSS percontohan Tk. Kabupaten	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra DP2KBP3A	Keterangan	OPD
*Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Yang Terbina	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
*Persentase keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan dalam bidang KG dan hak anak	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
Persentase data terpilah anak	Indikator program	DP2KBP3A
*Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**jumlah PD yang memanfaatkan data gender dan anak	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	Indikator program	DP2KBP3A
*Persentase lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah lembaga pendampingan hak anak yang memberikan edukasi terkait gizi dan program kesehatan anak (bayi, balita, anak-anak).	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Lembaga Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A
*persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina ( materi edukasi terkait gizi seimbang dan program kesehatan anak (bayi, balita, anak-anak).	Indikator kegiatan	DP2KBP3A
**Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator sub kegiatan	DP2KBP3A

Lampiran 13 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pendidikan

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Disdik	Keterangan	OPD
<b>RATA RATA CAPAIAN SPM PENDIDIKAN</b>	Indikator Tujuan	<b>Disdik</b>
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Indikator sasaran	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Indikator sasaran	
APK PAUD, SD, SMP, Kejar Paket	Indikator Program; Indikator kegiatan	<b>Disdik</b>
jumlah ruang kelas baru yang dibangun	Indikator sub kegiatan	<b>Disdik</b>
jumlah perpustakaan yang dibangun	Indikator sub kegiatan	<b>Disdik</b>
Jumlah pemb. sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	Indikator sub kegiatan	<b>Disdik</b>
jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Indikator sub kegiatan	<b>Disdik</b>
jumlah siswa SD yang diberi beasiswa (SPP)miskin	Indikator sub kegiatan	<b>Disdik</b>
Jumlah Sekolah Dasar penerima BOS	Indikator sub kegiatan	<b>Disdik</b>
Indek pemerataan guru dan mapel SD, SMP, UN SMP	Indikator program	<b>Disdik</b>
Persentase peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal -> nilai mutu rapor mulok	Indikator program; Indikator kegiatan	<b>Disdik</b>
**Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikutibimtek penyusunan kompetensi dasar mulok PAUD dan PNF	Indikator sub kegiatan	<b>Disdik</b>
**Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikutibimtek Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Indikator sub kegiatan	<b>Disdik</b>
**Jumlah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Indikator sub kegiatan	<b>Disdik</b>
**Jumlah guru yang mengikuti kegiatan penyusunan kurikulum mulok dikdas	Indikator sub kegiatan	<b>Disdik</b>
Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda	Indikator program	<b>Disdik</b>
*persentase sekolah yang telah mengikuti pembinaan bahasa	Indikator Kegiatan	<b>Disdik</b>
presentase lembaga pendidikan yang telah memiliki ijin operasional	Indikator program	<b>Disdik</b>
*Jumlah Lembaga yang layak usul hasil penilaian	Indikator kegiatan	<b>Disdik</b>
*jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan perijinan	Indikator kegiatan	<b>Disdik</b>
*Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang mengikuti Monev perijinan	Indikator kegiatan	<b>Disdik</b>
<b>RATA RATA CAPAIAN SPM PENDIDIKAN</b>	Indikator Tujuan	<b>Disdik</b>
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Indikator sasaran	<b>Disdik</b>
Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Indikator sasaran	<b>Disdik</b>
APK PAUD, SD, SMP, Kejar Paket	Indikator Program; Indikator kegiatan	<b>Disdik</b>

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Disdik	Keterangan	OPD
<b>RATA RATA CAPAIAN SPM PENDIDIKAN</b>	Indikator Tujuan	<b>Disdik</b>
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Indikator sasaran	<b>Disdik</b>
Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Indikator sasaran	<b>Disdik</b>
APK PAUD, SD, SMP, Kejar Paket	Indikator Program; Indikator kegiatan	<b>Disdik</b>
<b>Pengelolaan pendidikan</b>	<b>Indikator program</b>	<b>Disdik</b>
<b>*Pengelolaan pendidikan PAUD &amp; TK</b>	<b>Indikator kegiatan</b>	<b>Disdik</b>
<b>**Persentase guru PAUD &amp; TK yang mendapat pembinaan pengetahuan gizi seimbang/ B2SA</b>	<b>Indikator sub kegiatan</b>	<b>Disdik, Dinkes, Dispakan</b>
<b>*Persentase PAUD &amp; TK yang mengajarkan tentang gizi seimbang dalam kegiatan pembelajaran</b>	<b>Indikator sub kegiatan</b>	<b>Disdik, Dinkes, Dispakan</b>
<b>*Persentase PAUD &amp; TK yang menyediakan makanan (<i>school feeding program</i>)</b>	<b>Indikator sub kegiatan</b>	<b>Disdik, Dinkes, Dispakan</b>
<b>*Pengelolaan pendidikan sekolah dasar</b>	<b>Indikator kegiatan</b>	<b>Disdik</b>
<b>**Persentase sekolah yang menyediakan makanan (<i>school feeding program</i>)</b>	<b>Indikator sub kegiatan</b>	<b>Disdik, Dinkes, Dispakan</b>
<b>*Pengelolaan pendidikan SMP</b>	<b>Indikator kegiatan</b>	<b>Disdik</b>
<b>**Jumlah Renovasi kantin sekolah</b>	<b>Indikator sub kegiatan</b>	<b>Disdik</b>
<b>** Persentase sekolah yang mendapat penyuluhan kantin sehat</b>	<b>Indikator sub kegiatan</b>	<b>Disdik, Dinkes, Dispakan</b>
<b>**Penyediaan dukungan sarana/prasarana kantin sehat (sanitasi hygiene + B2SA )</b>	<b>Indikator sub kegiatan</b>	<b>Disdik</b>
<b>**Persentase siswa SMP yang mendapat penyuluhan gizi seimbang dan kesehatan</b>	<b>Indikator sub kegiatan</b>	<b>Disdik, Dinkes, Dispakan</b>
<b>Pengembangan kurikulum</b>	<b>Indikator program</b>	<b>Disdik</b>
<b>*Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar</b>	<b>Indikator kegiatan</b>	<b>Disdik</b>
<b>**Penetapan materi tentang gizi seimbang/B2SA dalam kurikulum muatan lokal</b>	<b>Indikator sub kegiatan</b>	<b>Disdik, Dinkes, Dispakan</b>

Lampiran 14 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pariwisata dan Budaya

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Disparbud	Keterangan	OPD
Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI	Indikator program	Disparbud
*Jumlah creative Hub yang terbentuk	Indikator kegiatan	Disparbud
*Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf	Indikator kegiatan	Disparbud
**Jumlah Riset Sektor Ekraf	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Penyedia Pendanaan dan Pembiayaan Sektor Ekraf	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Pengembangan Sistem Pemasaran pada Sektor Ekraf	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Penyediaan Fasilitas Kekayaan Intelektual Sektor Ekraf	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekraf	Indikator sub kegiatan	Disparbud
Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah dibina	Indikator program	Disparbud
*Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan	Indikator kegiatan	Disparbud
**Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Pelatihan dasar SDM Kepariwisata yang terlaksana	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi Pengembangan Kompetensinya	Indikator sub kegiatan	Disparbud
Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf	Indikator kegiatan	Disparbud
*Jumlah Fasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Sektor Ekraf	Indikator sub kegiatan	Disparbud
*Jumlah Dukungan Penyediaan Fasilitas untuk Pelaku Ekraf dalam Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Indikator sub kegiatan	Disparbud
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	Indikator program	Disparbud
*Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online	Indikator kegiatan	Disparbud
**Jumlah Promosi Pariwisata melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Promosi wisata kuliner melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Event Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bandung yang terfasilitasi	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah pemasaran wisata kuliner yang terfasilitasi	Indikator sub kegiatan	Disparbud
*Jumlah Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekraf	Indikator sub kegiatan	Disparbud

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Disparbud	Keterangan	OPD
*Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online	Indikator kegiatan	Disparbud
Jumlah desa wisata yang ditata	Indikator program	Disparbud
Jumlah destinasi baru	Indikator program	Disparbud
*Prosentase Daya Tarik Wisata yang dikelola	Indikator kegiatan	Disparbud
**Jumlah dokumen penetapan Daya Tarik Wisata (DTW)	Indikator sub kegiatan	Disparbud
** Jumlah dokumen penetapan Daya Tarik Wisata Kuliner	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah dokumen perencanaan pengembangan DTW Kabupaten Bandung	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah dokumen perencanaan penetapan standar wisata kuliner yang berpedoman pada prinsip B2SA	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang tersusun	Indikator sub kegiatan	Disparbud
Persentase Kawasan strategis pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	Indikator kegiatan	Disparbud
**Jumlah dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata/destinasi wisata tingkat kabupaten	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah kawasan strategis pariwisata/destinasi wisata kabupaten / kota yang dikembangkan	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah kawasan/pelaku wisata kuliner yang dikembangkan dan diberi edukasi B2SA	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata/destinasi wisata Kabupaten Bandung	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indikator sub kegiatan	Disparbud
**Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bandung	Indikator sub kegiatan	Disparbud

Lampiran 15 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra DinkopUKM	Keterangan	OPD
Persentase koperasi sehat	Indikator program	DinkopUKM
*Persentas koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam/koperasi yang dinilai kesehatannya	Indikator kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah koperasi yang dibina, diawasi, dan dinilai kesehatannya	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
*Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan koperasi sehat	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
Persentase koperasi patuh	Indikator program	DinkopUKM
*Persentase koperasi/koperasi simpan koperasi yang diperiksa dan diawasi simpan pinjam	Indikator kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah koperasi dimonitoring./dievaluasi/mendapat penghargaan/mengikuti pelatihan, workshop, bimtek perkoperasian	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah koperasi dibina/diawasi/dinilai kepatuhannya	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan koperasi berprestasi	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
Persentase kapasitas usaha mikro	Indikator program	DinkopUKM
*Persentase usaha mikro yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Indikator kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah usaha mikro yang didata potensi dan pengembangannya	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
*Persentase usaha mikro/ UMKM yang mendukung penyediaan olahan pangan lokal	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah UMKM yang difasilitasi perizinan usaha mikro	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelembagaan UMKM	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
Persentase kualitas usaha mikro	Indikator program	DinkopUKM
*Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	Indikator kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi produk bagi UMKM	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah UMKM yang yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah UMKM yang mengikuti pendampingan bagi UMKM	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
Persentase koperasi koperasi berizin	Indikator program	DinkopUKM
*Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Indikator kegiatan	DinkopUKM
*Persentase koperasi yang difasilitasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas	Indikator kegiatan	DinkopUKM
Persentase SDM koperasi yang kompeten	Indikator program	DinkopUKM
Persentase SDM koperasi yang mengikuti pendidikan pelatihan koperasi	Indikator kegiatan	DinkopUKM
*Jumlah pra koperasi yang mengikuti kegiatan	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
*Jumlah SDM koperasi yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Indikator program	DinkopUKM
*Persentase koperasi yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi	Indikator kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah kegiatan promosi hasil produk usaha koperasi	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM

<b>Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan</b>		
<b>IK Renstra DinkopUKM</b>	<b>Keterangan</b>	<b>OPD</b>
**Jumlah koperasi penerima akses permodalan yang dimonitoring dan dievaluasi	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah koperasi yang difasilitasi lembaga permodalan	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM
**Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraan dengan pihak lain (antar koperasi, perusahaan dan buyer)	Indikator sub kegiatan	DinkopUKM

Lampiran 16 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra Disperkimtan	Keterangan	OPD
AKSES AMAN TERHADAP AIR MINUM DI KAWASAN PERMUKIMAN	Indikator Program	Disperkimtan
*Persentase Akses Aman Terhadap Air Bersih di Kawasan Perdesaan	Indikator kegiatan	Disperkimtan
**jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terbangun	Indikator sub kegiatan	Disperkimtan
*jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang diperbaiki	Indikator sub kegiatan	Disperkimtan
*Jumlah kelompok yang berkomitmen mengelola air bersih dan sanitasi berstrata baik	Indikator sub kegiatan	Disperkimtan
AKSES AMAN TERHADAP SANITASI DI KAWASAN PERMUKIMAN	Indikator Program	Disperkimtan
*Prosentase rata-rat KK yang memiliki akses sanitasi per kecamatan	Indikator kegiatan	Disperkimtan
**Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik)	Indikator sub kegiatan	Disperkimtan
**Jumlah Pemeliharaan dan operasional IPAL Domestik	Indikator sub kegiatan	Disperkimtan
**Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik)	Indikator sub kegiatan	Disperkimtan
PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN/DIKELOLA	Indikator program	Disperkimtan
*Jumlah kegiatan kajian penggunaan dan pemanfaatan tanah - Jumlah kegiatan sosialisasi penyuluhan teknis tentang pertanahan	Indikator kegiatan	Disperkimtan
**Jumlah kegiatan kajian penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indikator sub kegiatan	Disperkimtan
**Jumlah Kegiatan sosialisasi penyuluhan teknis tentang pertanahan	Indikator sub kegiatan	Disperkimtan

Lampiran 17 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

<b>Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan</b>		
<b>IK Renstra DPUTR</b>	<b>Keterangan</b>	<b>OPD</b>
Prosentase jalan mantap	Indikator program	DPUTR
*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap	Indikator kegiatan	DPUTR
*Lahan/tanah yang Terbebaskan Untuk Jalan	Indikator kegiatan	DPUTR
*Jumlah dokumen survey kondisi jalan dan jembatan yang tersusun	Indikator kegiatan	DPUTR
*Panjang Bangunan Pelengkap Jalan TPT yang terbangun Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan Panjang trotoar yang terbangun	Indikator kegiatan	DPUTR
*Panjang jalan yang dibangun untuk dilebarkan/dipelihara	Indikator kegiatan	DPUTR
*Jumlah Jembatan yang dibangun/direhabilitasi/terpelihara	Indikator kegiatan	DPUTR
Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Indikator kegiatan	DPUTR
Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun/direhabilitasi/dipelihara	Indikator kegiatan	DPUTR
Prosentase SDM Konstruksi yang tersertifikasi	Indikator program	DPUTR
*Jumlah peserta pelatihan / bimtek jasa konstruksi yang mendapatkan sertifikat terampil konstruksi	Indikator kegiatan	DPUTR
Prosentase genangan air	Indikator program	DPUTR
Jumlah dokumen perencanaan/supervisi pembangunan saluran drainase	Indikator kegiatan	DPUTR
Panjang saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi	Indikator kegiatan	DPUTR
Persentase irigasi terairi	Indikator program	DPUTR
*Luas embung dan penampungan lainnya yang dibangun	Indikator kegiatan	DPUTR
*Panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang direhabilitasi	Indikator kegiatan	DPUTR
*Volume Jaringan Irigasi permukaan/bendung yang direhabilitasi/dipelihara		DPUTR
Persentase kesesuaian ruang	Indikator program	DPUTR
*Jumlah Kegiatan verifikasi/validasi, persetujuan substansi dan konsultasi dalam rangka penetapan dokumen penataan ruang	Indikator kegiatan	DPUTR
*Jumlah Kegiatan verifikasi/validasi, persetujuan substansi dan konsultasi dalam rangka penetapan dokumen penataan ruang	Indikator kegiatan	DPUTR
*Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Indikator kegiatan	DPUTR
*Jumlah dokumen kajian bahan penyusunan RTRW	Indikator kegiatan	DPUTR
*Jumlah kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat	Indikator kegiatan	DPUTR
*Jumlah kegiatan koordinasi dan Monev pelaksanaan penataan ruang	Indikator kegiatan	DPUTR
Prosentase SDM Konstruksi yang tersertifikasi	Indikator program	DPUTR
*Jumlah peserta pelatihan / bimtek jasa konstruksi yang mendapatkan sertifikat terampil konstruksi	Indikator kegiatan	DPUTR
<b>Perwujudan bangunan pemerintah</b>	Indikator program	DPUTR

Indikator RENSTRA sesuai sistem pangan		
IK Renstra DPUTR	Keterangan	OPD
*Jumlah dokumen data bangunan pemerintah yang disusun	Indikator kegiatan	DPUTR
*Jumlah bangunan milik pemerintah yang dibangun	Indikator kegiatan	DPUTR
*Jumlah Pembangunan Rumah Sakit	Indikator kegiatan	DPUTR
*Jumlah bangunan milik pemerintah yang direhabilitasi/renovasi (Sarana kesehatan/ RS)	Indikator kegiatan	DPUTR

Lampiran 18 Kesesuaian indikator Renstra dengan sistem pangan serta rekomendasi untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Identifikasi Indikator RENSTRA		
IK Renstra Bappeda	Keterangan	OPD
*Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	Indikator kegiatan	Bappeda
**Jumlah dokumen RKA-OPD	Indikator sub kegiatan	Bappeda
*Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Indikator kegiatan	Bappeda
**Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	Indikator sub kegiatan	Bappeda
Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD (indikator tambahan harus menjadi perhatian)	Indikator program	Bappeda
Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD (indikator tambahan harus menjadi perhatian)	Indikator program	Bappeda
Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD	Indikator program	Bappeda
*Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia (dampak sistem pangan/ status gizi)	Indikator kegiatan	Bappeda
**Jumlah dokumen koordinasi perencanaan/pelaporan hasil asistensi/monev (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang pembangunan manusia	Indikator sub kegiatan	Bappeda
*Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup perekonomian dan SDA (sistem pangan)	Indikator kegiatan	Bappeda
**Jumlah dokumen koordinasi perencanaan/pelaporan hasil asistensi/monev bidang perekonomian dan SDA	Indikator sub kegiatan	Bappeda
*Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup infrastruktur dan kewilayahan	Indikator kegiatan	Bappeda
**Jumlah dokumen koordinasi perencanaan/pelaporan hasil asistensi/monev (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan	Indikator sub kegiatan	Bappeda
Capaian nilai perencanaan pembangunan daerah	Indikator program	Bappeda
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Indikator kegiatan	Bappeda
Jumlah dokumen ranwal RKPD dan dokumen RPJMD	Indikator sub kegiatan	Bappeda
Jumlah penyelenggaraan Musrembang RKPD	Indikator sub kegiatan	Bappeda
Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan daerah (Dokumen RKPD, RKPD perubahan, dokumen RPJMD)	Indikator sub kegiatan	Bappeda
Persentase ketersediaan dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan	Indikator kegiatan	Bappeda
*Jumlah dokumen analisa pembangunan	Indikator sub kegiatan	Bappeda
*Jumlah dokumen prosiding satu data kabupaten Bandung (SDKP)	Indikator sub kegiatan	Bappeda
Persentase hasil penelitian/kajian yang diseminasikan	indikator program	Bappeda
Persentase peningkatan jumlah inovasi yang kreatif di perangkat daerah	indikator program	Bappeda
Jumlah dokumen hasil penelitian dan penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan	Indikator kegiatan	Bappeda

<b>Identifikasi Indikator RENSTRA</b>		
<b>IK Renstra Bappeda</b>	<b>Keterangan</b>	<b>OPD</b>
**Jumlah dokumen pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Indikator sub kegiatan	Bappeda
*Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	Indikator kegiatan	Bappeda
**Jumlah dokumen hasil penelitain dan pengembangan koperasi/usaha kecil menengah	Indikator sub kegiatan	Bappeda
**Jumlah dokumen hasil penelitain dan pengembangan komunikasi dan informatika	Indikator sub kegiatan	Bappeda
*Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Indikator kegiatan	Bappeda
**Jumlah dokumen inovasi daerah	Indikator sub kegiatan	Bappeda